

Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

*Berbasis***SUSTAINABLE LIVELIHOOD
DI PESISIR KOTA SURABAYA**

Kehidupan kawasan pesisir merupakan tema yang selalu menarik untuk diikuti. Permasalahan yang kompleks dari aspek ekonomi hingga aspek sosial, serta pengaruh-pengaruh yang muncul terhadap aspek lingkungan memunculkan banyak spekulasi serta metode penyelesaian. Buku ini memberikan gambaran awal mengenai kondisi masyarakat pesisir dan perilaku bermukim yang mempengaruhi aspek kehidupan sehari-hari. Termasuk menunjukkan proses pengembangan di kawasan pesisir dan penyebab yang paling sering muncul, yaitu kemiskinan. Konsep kemiskinan dibahas detail, termasuk filosofi kemiskinan yang ada di kawasan pesisir dan bagaimana menangani permasalahan kemiskinan tersebut. Kerentanan dan cara beradaptasi nelayan terhadap lingkungan seperti perubahan iklim juga dimasukkan sebagai salah satu faktor besar yang mempengaruhi kehidupan masyarakat pesisir. Pada buku ini, secara positif masyarakat dianggap mampu mengatasi permasalahan yang ada di kawasan pesisir dengan meningkatkan pemberdayaan diri sesuai prinsip dan langkah-langkah pemberdayaan yang harus dilakukan. Buku ini layak dibaca bagi para pemangku kebijakan, para ahli, akademisi hingga masyarakat umum demi membangun kehidupan kawasan pesisir yang lebih baik.



Anggota Ikapi

email: dream.litera@gmail.com
www.dreamlitera.com

ISBN: 978-623-7598-26-8

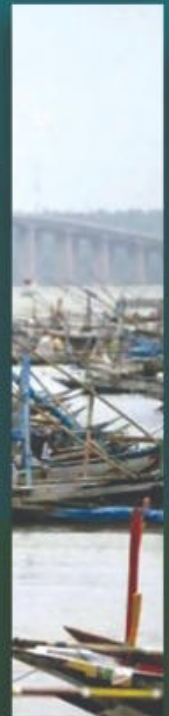


Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Berbasis Sustainable Livelihood di Pesisir Kota Surabaya

Ardiyanto Maksimilianus Gai



Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

*Berbasis***SUSTAINABLE LIVELIHOOD
DI PESISIR KOTA SURABAYA**

Ardiyanto Maksimilianus Gai



Pemberdayaan Masyarakat Nelayan
Berbasis Sustainable Livelihood
di Pesisir Kota Surabaya

Ardiyanto Maksimilianus Gai, ST., M.Si

DREAM LITERA
2020

Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Berbasis Sustainable Livelihood
di Pesisir Kota Surabaya

©Dream Litera Buana
Cetakan pertama, Agustus 2020
96 halaman, 18,2 x 25,7 cm

ISBN: 978-623-7598-26-8

Penulis:

Ardiyanto Maksimilianus Gai, ST., M.Si

Diterbitkan oleh:

CV. Dream Litera Buana

Anggota IKAPI No. 158/JTI/2015

Perum Griya Permata Alam Blok KP 29,
Ngijo, Karangploso, Kabupaten Malang
Email: dream.litera@gmail.com
Website: www.dreamlitera.com

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku ini dengan cara apapun,
tanpa izin tertulis dari penerbit.

Distributor:

Dream Litera Buana



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat, rahmat dan karuniaNya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Berbasis *Sustainable Livelihood* di Pesisir Kota Surabaya”. Ucapan terimakasih tak terhingga juga penulis ucapkan kepada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis sehingga pada tahun 2017 penulis mendapatkan hibah penelitian dosen pemula dengan judul “Konsep Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat di Wilayah Pesisir Kota Surabaya Berbasis *Sustainable Livelihood Approach*” dan selanjutnya pada tahun 2019 penulis kembali mendapatkan hibah pengabdian masyarakat dengan judul “Pemberdayaan Kelompok Nelayan Sukolilo dalam Upaya Peningkatan *Sustainable Livelihood*, dan Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir Kota Surabaya”

Buku ini merupakan bagian kecil dari hasil penelitian dan pengabdian masyarakat di wilayah Pesisir Kota Surabaya khususnya di Pesisir Sukolilo Baru. Masyarakat pesisir termasuk masyarakat yang masih terbelakang dan berada dalam posisi marginal. Selain itu banyak dimensi kehidupan yang tidak diketahui oleh orang luar tentang karakteristik masyarakat pesisir. Mereka mempunyai cara berbeda dalam aspek pengetahuan, kepercayaan,

peranan sosial, dan struktur sosialnya. Sementara itu dibalik kemarginalannya masyarakat pesisir tidak mempunyai banyak cara dalam mengatasi masalah yang hadir.

Salah satu masalah yang muncul adalah masyarakat pesisir merupakan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal secara ekonomi, sosial, akses pendidikan dan kesehatan maupun kultural. Kondisi ini dapat ditandai dengan adanya beberapa ciri, seperti kemiskinan, keterbelakangan sosial budaya dan rendahnya sumber daya manusia. Kondisi ini menyebabkan tidak sedikit masyarakat nelayan atau pesisir rentan terhadap bencana dan atau perubahan iklim.

Konsep pemberdayaan (*empowerment*) sering digunakan oleh banyak pihak untuk mengekspresikan kegiatan pengabdian masyarakat dengan pendekatan pemberdayaan sebagai salah satu cara dalam penyelesaian masalah, termasuk pada masyarakat di wilayah pesisir dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi. Sebagai sebuah konsep alternatif pembangunan, pada intinya kegiatan pemberdayaan merupakan kegiatan multidimensi yang memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat, yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung, partisipatif, demokratis, dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung (Friedman, 1992).

Salah satu pendekatan pemberdayaan masyarakat yang cukup inovatif adalah *the Sustainable Livelihood Approach (SLA)*, yang pada dasarnya upaya pelibatan (partisipasi) masyarakat untuk belajar dan beraktivitas secara berkelanjutan dengan cara unik mereka menjalani hidup dalam rangka meningkatkan kualitas hidup mereka. *Sustainable Livelihood Approach* merupakan cara pandang meraih sukses dalam melalui pemberdayaan dengan menggunakan 5 modal penghidupan berkelanjutan

yaitu: modal alam, modal sosial, modal finansial, modal fisik/infrastruktur dan modal manusia.

Penulis mengembangkan buku ini untuk memfasilitasi informasi dan pengetahuan yang perlu didapatkan mengenai pemberdayaan masyarakat. Buku ini berisi mengenai identifikasi fisik dasar kawasan, masyarakat, karakteristik permukiman hingga perilaku masyarakat pesisir. Selain itu dalam buku ini juga menunjukkan bagaimana pengembangan kawasan pesisir, proses pengembangan dan kajian yang dilakukan dalam pengembangan kawasan pesisir. Terkait dengan penyebab dari masalah yang muncul yaitu kemiskinan, penulis menunjukkan konsep dan kaitan kemiskinan dengan metode pendekatan *sustainable livelihood*. Selain itu, penulis juga memberikan penjabaran mengenai pengaruh perubahan iklim terhadap kondisi masyarakat pesisir. Pada akhirnya, keseluruhan informasi dan pengetahuan diatas, diolah sedemikian rupa untuk menghasilkan konsep, prinsip dan langkah-langkah pemberdayaan yang tepat untuk menangani permasalahan di kawasan pesisir.

Buku ini masih jauh dari kata sempurna, namun semoga buku ini dapat menjadi tambahan referensi untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya di wilayah pesisir dalam konteks kemiskinan dan kerentanan terhadap perubahan iklim.

Februari 2020

Penulis



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel dan Gambar	v
Chapter 1 Latar Belakang dan Permasalahan Pesisir Perkotaan	1
Chapter 2 Kondisi Masyarakat Pesisir di Perkotaan	
2.1 Fisik Dasar Kawasan Pesisir	6
2.2 Kondisi Masyarakat di Kawasan Pesisir	9
2.3 Karakteristik Permukiman di Kawasan Pesisir	15
2.4 Karakteristik Bermukim dan Perilaku Masyarakat di Kawasan Pesisir.....	19
Chapter 3 Pengembangan Kawasan Pesisir di Perkotaan	
3.1 Pengembangan Kawasan Pesisir dan Permukiman Nelayan	26
3.2 Proses Pengembangan Kawasan Pesisir dan Permukiman Nelayan	30
3.3 Kajian Matriks Kawasan Pesisir dan Permukiman Nelayan di Kota Surabaya	33
Chapter 4 Kemiskinan di Kawasan Pesisir Perkotaan	
4.1 Konsep Kemiskinan	40
4.2 Kemiskinan di Kawasan Pesisir Perkotaan berdasarkan <i>Sustainable Livelihood Approach</i> (SLA).....	52
4.3 Pengaruh Perubahan Iklim terhadap Kerentanan dan Adaptasi Nelayan Berdasarkan Perspektif SLA.....	55
Chapter 5 Pemberdayaan Nelayan di Pesisir Perkotaan Melalui <i>Sustainable Livelihood Approach</i> (SLA)	
5.1 Konsep Pemberdayaan	62
5.2 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir	66
5.3 Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Melalui <i>Sustainable Livelihood Approach</i> (SLA).....	68
5.4 Langkah-langkah Pemberdayaan Masyarakat Melalui <i>Sustainable Livelihood Approach</i> (SLA).....	78
Daftar Pustaka	



DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1.	Matriks Perbandingan Kawasan Pesisir dan Permukiman Nelayan di Kota Surabaya	33
Tabel 2.	Prinsip-Prinsip Pendekatan Sustainable Livelihood dan Bentuk Prakteknya	72
Gambar 1.	Kerangka Sustainable Livelihood	50
Gambar 2.	Kerangka Analisis Penghidupan	51
Gambar 3.	Konsep Pendekatan Sustainable Livelihoods dalam Perubahan Iklim	60
Gambar 4.	Pentagon Asset: merepresentasikan kesenjangan asset yang dimiliki berdasarkan gender, maupun suku/SARA	76
Gambar 5.	Tingkat Sustainable Livelihood di Kampung Nelayan Sukolilo Pesisir Kota Surabaya	77



1 Latar Belakang dan Permasalahan Pesisir Perkotaan

Masyarakat pesisir pada umumnya bermata pencaharian sebagai nelayan, dimana kemampuan nelayan dalam meningkatkan pendapatan, menghidupi keluarga serta membangun masa depan yang lebih baik masih rendah. Masyarakat pesisir identik dengan nelayan merupakan bagian dari masyarakat terpinggirkan yang masih terus bergulat dengan berbagai persoalan kehidupan, termasuk dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kesulitan yang dialami biasanya karena usaha penangkapan ikan yang mereka lakukan sangat bergantung pada alam dan lingkungan. Dimana nelayan pada umumnya untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-harinya hanya mengandalkan hasil penjualan ikan yang didapatkan dari menangkap ikan di laut.

Masyarakat nelayan memiliki karakteristik khusus yang membedakan mereka dari masyarakat lain, dimana nelayan identik dengan kemiskinan, banyaknya jumlah anak dalam keluarga dan pendidikan yang rendah. Penyebab lain terjadinya kemiskinan pada masyarakat nelayan adalah tekanan kehidupan yang dihadapi oleh fluktuasi musim ikan, keterlibatan kemampuan teknologi penangkapan, jaringan pemasaran yang dianggap merugikan nelayan serta sistem bagi hasil yang timpang sehingga nelayan tradisional dan nelayan buruh merupakan kelompok sosial yang paling terpuruk tingkat kesejahteraan hidupnya (Kusnadi, 2009). Hal ini berlanjut dalam generasi selanjutnya dalam keluarga nelayan. Keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya akibat ketidakpastian usaha. Kemiskinan yang melekat mengakibatkan mereka tidak mampu memberikan pendidikan yang cukup bagi anak-anaknya terutama pendidikan formal (Putri, 2009).

Selain itu, terdapat kebutuhan masyarakat yang selama ini tidak dipenuhi, yaitu kurang dilibatkannya masyarakat pesisir dalam pembangunan. Keterlibatan yang dimaksudkan di sini adalah keterlibatan secara total dalam semua aspek program pembangunan yang menyangkut diri mereka, yaitu sejak perencanaan program, pelaksanaannya, evaluasinya, serta perelevansiannya. Dengan kata lain, kekurangan yang dimiliki selama ini yaitu tidak atau kurang partisipasi masyarakat dalam pembangunan diri mereka sendiri. Partisipasi diperlukan karena dengan segala jenis upaya, tidak ada seorang miskinpun yang bisa keluar dari kemiskinannya dengan bantuan orang lain, bila dia tidak membantu dirinya sendiri.

Program pemberdayaan masyarakat telah menjadi umum dalam upaya peningkatan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan. Dengan pemberdayaan masyarakat maka pembangunan tidak mulai dari nol, tetapi berawal dari sesuatu yang sudah ada pada masyarakat. Pemberdayaan berarti apa yang telah dimiliki oleh masyarakat adalah sumberdaya pembangunan yang perlu dikembangkan sehingga makin nyata kegunaannya bagi masyarakat sendiri. Pemberdayaan masyarakat nelayan dan pembangunan kawasan pesisir secara terpadu masih diyakini sebagai upaya ideal untuk mengatasi berbagai persoalan sosial, ekonomi dan lingkungan yang menumpuk di kawasan pesisir. Kunci keberhasilan program pembangunann untuk membebaskan masyarakat pesisir dari berbagai jerat kehidupan tersebut bertumpu pada kemampuan sumber daya lokal, berorientasi membangun kemandirian internal masyarakat, adanya dukungan kebijakan yang konsisten dari pemerintah dan keterlibatan pihak-pihak lain untuk mendorong dinamika pembangunan kawasan atas dasar tanggung jawab bersama, kepedulian sosial dan bersifat menguntungkan bagi semua pihak secara berkelanjutan (Kusnadi, 2006).

Tidak selesai dengan permasalahan lingkungan disekitar nelayan, namun saat ini juga terdapat masalah perubahan iklim yang semakin mempengaruhi produktifitas para nelayan di kawasan pesisir. Sebagai salah

satu negara penghasil ikan tangkapan di dunia, Indonesia, negeri dengan panjang pantai mencapai 81.000 kilometer dan memiliki kawasan laut seluas 5,8 juta kilometer persegi, sangat rentan terhadap perubahan iklim. Sektor perikanan yang memiliki peran penting secara sosial dan ekonomi, sangat terpengaruh erat dengan berbagai perubahan kondisi alam yang kini terus menekan hasil tangkapan ikan di laut. Berbagai faktor seperti ketidakpastian cuaca, kondisi cuaca ekstrem, kenaikan suhu permukaan laut (*sea surface temperature-SST*), naik turunnya harga bahan bakar serta perubahan arah angin, menurunkan tingkat produktivitas nelayan. Perubahan iklim juga turut memengaruhi distribusi dan penyebaran ikan di laut, sementara kenaikan harga bahan bakar akan memengaruhi kesempatan nelayan untuk menangkap ikan seiring dengan pergeseran penyebaran ikan yang terus berubah akibat perubahan iklim. Hal ini diungkapkan oleh peneliti dari Jurusan Ilmu Kelautan dan Teknologi, Fakultas Perikanan dan Ilmu kelautan Institut Pertanian Bogor, Jonson Lumban Gaol dan Bisman Nababan, bersama sejumlah peneliti dari Departemen Kelautan dan Perikanan, Khairul Amri dan Aryo Hanggono, serta Orbia Roswintiarti dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Dalam penelitian yang telah diterbitkan di terbitan resmi World Meteorological Organization ini, para peneliti tersebut melihat keterkaitan yang erat antara kenaikan suhu permukaan laut, dengan produksi ikan di kawasan perairan Indonesia. Kenaikan rata-rata suhu udara dalam tiga dekade terakhir sebesar sekitar 0,5 derajat celcius akibat emisi gas rumah kaca yang semakin memburuk menjadi penyebab perubahan iklim dan menurunnya jumlah tangkapan ikan di lautan. Dalam penelitian ini terungkap bahwa suhu udara mengalami kenaikan signifikan, dari sekitar 0,1 derajat celcius antara tahun 1951 hingga 1980, menjadi 0,5 derajat celcius dalam tiga dekade terakhir. Jika tidak ada upaya pencegahan lebih lanjut, diperkirakan kenaikan suhu udara mencapai 2,1 hingga 4,6 derajat celcius di tahun 2100 mendatang.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada kawasan pesisir, kondisi kehidupan nelayan selalu menjadi hal yang menarik untuk dibincangkan karena selalu dalam kondisi yang rentan. Nelayan dituntut untuk memiliki semangat kerja yang tinggi untuk dapat bertahan sebagai nelayan dan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan untuk memiliki semangat kerja tinggi dibutuhkan kemauan dan kemampuan. Hal ini memerlukan peran pemberdayaan dalam peningkatan produktifitas keluarga nelayan di kawasan pesisir. Sehingga, keterpaduan penanganan kemiskinan nelayan sangat dibutuhkan, tujuannya adalah untuk menghilangkan egosektor dari masing – masing pemangku kepentingan. Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan strategi yang tepat. Strategi adaptasi diartikan sebagai pilihan tindakan yang bersifat rasional dan efektif sesuai dengan konteks lingkungan sosial, politik, ekonomi dan ekologi, di mana penduduk miskin itu hidup.

Sehingga untuk menjawab tentang strategi dalam pengembangan kawasan pesisir, diperlukan tujuan-tujuan yang tepat agar konsep dan strategi tepat sasaran. Tujuan yang perlu dikembangkan antara lain :

1. Menghilangkan egosektor dari masing-masing pemangku kepentingan terkait pengembangan pesisir di perkotaan
2. Merumuskan kebijakan terkait berbagai disiplin ilmu agar tujuannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat nelayan
3. Mengetahui akar masalah yang sesungguhnya sehingga solusi bersifat komprehensif dan tidak parsial



Kondisi Masyarakat Pesisir di Perkotaan

2.1 Fisik Dasar Kawasan Pesisir

Ketchum dalam Kay dan Alder (1999: 2) dalam Baun (2008) “*The band of dry land adjacent ocean space (water dan submerged land) in wich terrestrial processes and land uses directly affect oceanic processes and uses, and vice versa*”. Diartikan bahwa wilayah pesisir adalah wilayah yang merupakan tanda atau batasan wilayah daratan dan wilayah perairan yang mana proses kegiatan atau aktivitas bumi dan penggunaan lahan masih mempengaruhi proses dan fungsi kelautan.

Pengertian wilayah pesisir menurut kesepakatan terakhir internasional adalah merupakan wilayah peralihan antara laut dan daratan, ke arah daral mencakup daerah yang masih terkena pengaruh percikan air laut atau pasang surut, dan ke arah laut meliputi daerah paparan benua (*continental shelf*) (Beatley et al, dalam Dahuri, dkk, 2001).

Berdasarkan Undang-undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, batasan wilayah pesisir kearah daratan mencakup wilayah administrasi daratan dan kearah perairan laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau kearah perairan kepulauan.

Berdasarkan biofisik wilayah, ciri khas kawasan pesisir, laut dan sumber daya yang ada di dalamnya akan mengalami perubahan secara signifikan akibat adanya intervensi manusia, contohnya seperti bentang alam yang sulit diubah, proses pertemuan air tawar dan air laut yang mampu menghasilkan ekosistem yang khas. Sedangkan berdasarkan aspek kepemilikan, wilayah pesisir dan laut serta sumberdaya yang terkandung di

dalamnya bersifat terbuka, dimana masyarakat memiliki hak untuk mengolah tanpa ada batasan teritori individu. Sehingga pengelolaan wilayah pesisir perlu dikelola secara terpadu dan bijaksana. Secara biofisik wilayah pesisir memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Secara empiris terdapat keterkaitan ekologis (hubungan fungsional) baik antar ekosistem di dalam kawasan pesisir maupun antara kawasan pesisir dengan lahan atas (*upland*) dengan laut lepas. Perubahan yang terjadi pada suatu ekosistem pesisir, cepat atau lambat, langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi ekosistem lainnya. Begitu pula halnya jika pengelolaan kegiatan pembangunan (industri, pertanian, pemukiman, dan lainlain) di lahan atas (*upland*) suatu DAS (Daerah Aliran Sungai) tidak dilakukan secara bijaksana akan merusak tatanan dan fungsi ekologis kawasan pesisir dan laut.
- b. Dalam suatu kawasan pesisir, biasanya terdapat lebih dari dua macam sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pembangunan. Terdapat keterkaitan langsung yang sangat kompleks antara proses-proses dan fungsi lingkungan dengan pengguna sumberdaya alam.
- c. Dalam suatu kawasan pesisir, pada umumnya terdapat lebih dari satu kelompok masyarakat (orang) yang memiliki keterampilan/keahlian dan kesenangan (*preference*) bekerja yang berbeda sebagai petani, nelayan, petani tambak, petani rumput laut, pendamping pariwisata, industri dan kerajinan rumah tangga dan sebagainya. Pada hal sangat sukar atau hampir tidak mungkin untuk mengubah kesenangan bekerja (profesi) sekelompok orang yang sudah mentradisi menekuni suatu bidang pekerjaan.
- d. Baik secara ekologis maupun secara ekonomis, pemanfaatan suatu kawasan pesisir secara monokultur (*single use*) adalah sangat rentan terhadap perubahan internal maupun eksternal yang menjurus pada kegagalan usaha. Misalnya suatu hamparan pesisir hanya digunakan

untuk satu peruntukan, seperti tambak, maka akan lebih rentan, jika hamparan tersebut digunakan untuk beberapa peruntukan.

- e. Kawasan pesisir pada umumnya merupakan sumberdaya milik bersama (*common property resources*) yang dapat dimanfaatkan oleh semua orang (*open access*). Padahal setiap sumberdaya pesisir biasanya berprinsip memaksimalkan keuntungan. Oleh karenanya, wajar jika pencemaran over eksploitasi sumberdaya alam dan konflik pemanfaatan ruang seringkali terjadi di kawasan ini, yang pada gilirannya dapat menimbulkan suatu tragedi bersama (*open tragedy*). (Rahmawaty, 2006)

Definisi wilayah pesisir menurut Nasution (2005) adalah wilayah peralihan laut ke daratan, dimana yang dimaksud wilayah daratan adalah daerah kearah darat yang masih terdampak peristiwa air laut atau pasang surut, sedangkan untuk wilayah laut yang dimaksud adalah daerah paparan benua. Selain itu, Nasution (2005) juga berpendapat bahwa perlu adanya pemanfaatan sumber daya alam yang ada di kawasan pesisir dan laut secara terpadu dikarenakan pesisir merupakan tempat berkumpulnya zat-zat dari hulu dan kawasan sekitarnya serta dari berbagai aktivitas masyarakat. Pembangunan kawasan pesisir secara terpadu akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sehingga memberikan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Namun pada kenyataannya wilayah pesisir serta wilayah laut masih belum mendapatkan perhatian untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi baik regional maupun nasional. Hal ini juga berpengaruh terhadap perkembangan kesejahteraan masyarakat pesisir yang masih berada dibawah garis kemiskinan.

Kota Surabaya sebagian besar merupakan dataran rendah berpantai dengan ketinggian antara 3 – 6 meter diatas permukaan laut, kecuali pada bagian selatan dan barat berupa bukit dengan ketinggian 25 – 45 meter di atas permukaan laut. Sehingga keberadaan air tanah sangat dipengaruhi oleh kondisi pasang surut yang terjadi di wilayah pantai. Adanya topografi yang

sebagian besar berupa dataran rendah, sangat berpengaruh pada respon hidrologi pada suatu luasan area, di mana dataran rendah memberikan aliran air permukaan yang rendah (lambat).

Berdasarkan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 wilayah pesisir Kota Surabaya, khususnya ruang darat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi antara lain permukiman nelayan, tambak garam dan ikan, pergudangan, militer, industri kapal, pelabuhan, wisata pesisir sampai dengan fungsi kawasan lindung di Pantai Timur Surabaya. Selain itu, terdapat aksesibilitas berupa jalan dan jembatan yang menghubungkan Kota Surabaya dan Pulau Madura (Jembatan Suramadu) dan Jembatan Sukolilo Lor – THP Kenjeran yang membuka akses di kawasan sisi timur laut Kota Surabaya. Selain itu, wilayah ruang laut Surabaya juga dikembangkan untuk kegiatan penangkapan ikan tradisional, wisata pantai di Kenjeran dan sekitarnya dan kawasan lindung laut di sekitar Pantai Timur Surabaya.

2.2 Kondisi Masyarakat di Kawasan Pesisir

Masyarakat pesisir pada umumnya adalah sekumpulan masyarakat yang pada umumnya berprofesi sebagai nelayan, pembudidaya ikan, pedagang ikan, dan lain-lain yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir membentuk dan memiliki kebudayaan khas, terkait dengan ketergantungannya pada pemanfaatan sumber daya pesisir. Masyarakat pesisir termasuk masyarakat yang masih terbelakang dan berada dalam posisi marginal. Selain itu banyak dimensi kehidupan yang tidak diketahui oleh orang luar tentang karakteristik masyarakat pesisir. Mereka mempunyai cara berbeda dalam aspek pengetahuan, kepercayaan, peranan sosial, dan struktur sosialnya. Sementara itu dibalik kemarginalannya masyarakat pesisir tidak mempunyai banyak cara dalam mengatasi masalah yang hadir.

Salah satu masalah yang muncul adalah ketertinggalan aspek ekonomi, sosial, akses pendidikan dan kesehatan maupun kultural pada masyarakat

pesisir. Kondisi ini dapat ditandai dengan munculnya beberapa ciri, seperti kemiskinan, keterbelakangan sosial budaya dan rendahnya sumber daya manusia. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir berprofesi sebagai nelayan, dan ini merupakan profesi yang dilakukan dari generasi ke generasi selanjutnya. Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, pengertian nelayan dan nelayan kecil adalah sebagai berikut :

“nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan”

“nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT)”

Menurut Nasution (2005), sumber daya alam yang dieksplorasi memberikan sifat dinamis pada masyarakat nelayan. Sifat dinamis yang dimaksud adalah perilaku nelayan yang harus berpindah-pindah untuk mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal. Selain itu, tingginya resiko untuk menjalankan usaha menyebabkan kondisi perekonomian nelayan tidak menentu dan tidak pasti. Beberapa pakar ekonomi sumberdaya memandang kemiskinan yang terjadi pada nelayan, pada umumnya disebabkan karena aspek sosial dan aspek ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam dan faktor pemilihan jenis teknologi dalam penangkapan ikan.

Karakteristik sumber daya yang dimaksud adalah kekayaan aset perikanan (*fixity and rigidity of fishing assets*). Dimana dalam aset perikanan ini terdapat kesulitan dalam mengubah bentuk serta fungsi yang akan digunakan untuk keperluan lain. Sehingga dampak yang terjadi adalah saat produktivitas yang dihasilkan aset rendah, nelayan tidak memiliki kemampuan untuk merubah fungsi aset tersebut. Sehingga yang terjadi adalah nelayan akan tetap memanfaatkan aset (menangkap ikan) meskipun hasil yang didapatkan rendah.

Nasution (2005) berpendapat bahwa *opportunity cost* yang rendah merupakan penyebab nelayan masih bertahan di bidang perikanan. Yang dimaksud dengan *opportunity cost* adalah adanya kesempatan atau kemungkinan lain melalui suatu usaha ekonomi selain menangkap ikan. Sehingga, nelayan memiliki pekerjaan lain saat musim paceklik ikan tiba. Hal ini yang mendasari bahwa rendahnya *opportunity cost* menjadi salah satu alasan meskipun menangkap ikan sudah tidak menghasilkan keuntungan. Selain itu, Nasution (2005) berpendapat bahwa *opportunity cost* yang ada di negara berkembang nilainya sangat kecil, hal ini menyebabkan nelayan bertahan dengan profesi menangkap ikan dan tidak ada kemungkinan mampu bekerja di bidang yang lain.

Berdasarkan pemahaman tersebut, diketahui bahwa nelayan lebih senang memiliki kepuasan hidup yang bisa diperolehnya dari menangkap ikan dan bukan berlaku sebagai pelaku yang semata-mata berorientasi pada peningkatan pendapatan. Hal ini menjadi pilihan hidup dari nelayan, sehingga meskipun ada pendapat bahwa kehidupan nelayan masuk dalam kemiskinan, namun nelayan tersebut tidak menganggap dirinya miskin dan masih hidup wajar dengan kehidupan yang dijalani.

Secara sosiologis, masyarakat nelayan memiliki perbedaan dengan masyarakat petani, misalnya saja dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan lahan. Masyarakat petani dihadapkan pada kondisi sumber daya yang terkontrol, sedangkan untuk masyarakat nelayan, apabila tangkapan berkurang akan menjadi sumber daya yang tidak terkontrol sehingga masyarakat nelayan harus berlayar lebih jauh untuk menemukan lahan baru.

Nasution (2005) berpendapat bahwa berdasarkan stratifikasi masyarakat nelayan dapat dibagi menjadi beberapa jenis tipologi, antara lain :

1. Nelayan kaya A, yaitu nelayan yang mempunyai kapal dan tidak perlu bekerja sebagai awak kapal karena telah mempekerjakan nelayan lain.

2. Nelayan kaya B, yaitu nelayan yang memiliki kapal tetapi juga ikut bekerja sebagai awak kapal .
3. Nelayan sedang, yaitu nelayan yang pendapatannya bergantung pada hasil sebagai dari bekerja sebagai nelayan. Memiliki perahu sendiri dan hanya mempekerjakan tenaga dari keluarganya.
4. Nelayan miskin, yaitu nelayan yang pendapatannya bergantung pada hasil bekerja sebagai nelayan akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga harus mencari sumber penghasilan tambahan dengan bekerja lain.

Tingkatan sosial pada nelayan yang ada di Indonesia pada umumnya dapat dibagi menjadi kategori masyarakat nelayan tradisional dan masyarakat nelayan nelayan buruh. Dua kategori nelayan tersebut merupakan penyumbang utama kuantitas produksi perikanan tangkap di lingkup nasional. Namun, kategori masyarakat nelayan ini berada pada tingkatan sosial yang rendah dalam transaksi perekonomian. Transaksi dalam bidang perikanan terhadap dua kategori nelayan ini berlangsung secara timpang dan eksploitatif. Masyarakat nelayan sebagai produsen, tidak mendapatkan pembagian yang layak, namun yang justru mendapatkan keuntungan adalah pedagang ikan berskala besar atau distributor. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa distributor yang menjadi penguasa ekonomi di desa-desa nelayan.

Selain itu, aktivitas perdagangan bukan merupakan satu-satunya faktor yang menimbulkan persoalan sosial di kalangan nelayan, faktor-faktor lain yang sinergi, seperti semakin meningkatnya kelangkaan sumberdaya perikanan, kerusakan ekosistem pesisir dan laut, serta keterbatasan kualitas dan kapasitas teknologi penangkapan, rendahnya kualitas sumberdaya manusia, ketimpangan akses terhadap sumberdaya perikanan, serta lemahnya proteksi kebijakan dan dukungan fasilitas pembangunan untuk masyarakat nelayan masih menjadi faktor yang menimbulkan persoalan.

Kesejahteraan sosial yang memburuk di kalangan nelayan terutama dirasakan di desa-desa pesisir yang perairannya mengalami *overfishing*

(tangkap lebih) sehingga hasil tangkap atau pendapatan yang di peroleh nelayan bersifat fluktuatif, tidak pasti, dan semakin menurun dari waktu ke waktu. Sehingga rumah tangga nelayan akan senantiasa berhadapan dengan tiga persoalan yang sangat krusial dalam kehidupan mereka, yaitu (1) pergulatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, (2) tersendat-sendatnya pemenuhan kebutuhan pendidikan anak-anaknya, dan (3) terbatasnya akses mereka terhadap jaminan kesehatan (Nasution, 2005).

Ketiga akses diatas merupakan kebutuhan hidup yang paling mendasar dalam rumah tangga nelayan, yang sering tidak terpenuhi secara optimal. Sehingga sangat sulit merumuskan dan membangun kualitas sumberdaya masyarakat nelayan, agar mereka memiliki kemampuan optimal dalam mengelola potensi sumber daya pesisir laut yang ada. Ketiadaan atau kekurangan kemampuan kreatif masyarakat nelayan untuk mengatasi sosial ekonomi di daerahnya akan mendorong mereka masuk perangkat keterbelakangan yang berkepanjangan sehingga dapat mengganggu pencapaian tujuan kebijakan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan. Untuk itu, perlu dipikirkan solusi strategi alternatif untuk mengatasi persoalan kehidupan sosial-ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat nelayan.

Kota Surabaya memiliki permasalahan pada kondisi masyarakat di daerah pesisir, tepatnya pada masalah ekonomi, sosial dan politik. Permasalahan ekonomi terjadi pada pendapatan nelayan yang tidak sepadan dengan tingginya kebutuhan, pendapatan nelayan hanya mencukupi dalam waktu sehari, sehingga jika mereka tidak melaut maka keluarganya tidak mempunyai uang untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Problematika sosial nelayan adalah rata-rata bersikap individualis, yaitu apabila ada salah satu nelayan melakukan pelanggaran dengan menggunakan potassium atau media penangkap lain yang dilarang, nelayan lain tidak peduli. Hal ini berbeda dengan nelayan dahulu yang masih ada rasa saling peduli satu sama lain. Sedangkan untuk problema politik, salah satu contoh adalah pada waktu pihak pemerintah yang peduli dengan kehidupan nelayan memberikan

bantuan kapal untuk menangkap ikan, ternyata nelayan belum mampu menyesuaikan dengan teknologi yang ada sehingga bantuan tidak dimanfaatkan dengan maksimal (Kalimang, 2015).

Beberapa fakta mengenai masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai nelayan di Kota Surabaya adalah adanya satu-satunya organisasi yang menaungi nelayan yaitu HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) yang telah ada sejak 1968. Dari sekitar 165 kelurahan di Kota Surabaya, terdapat sekitar 17 kelurahan yang diantaranya berprofesi sebagai nelayan. Sebagai salah satu kota yang berbatasan dengan pesisir, nelayan di Surabaya kurang mendapat perhatian lebih, dikarenakan pemerintah lebih fokus pada industri dan pelabuhan.

Selain itu, kehidupan masyarakat nelayan cukup memprihatinkan. Hal ini disebabkan karena pendapatan yang didapat tidak sepadan dengan kebutuhan yang tinggi. Masyarakat nelayan sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga orientasi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan juga tidak diprioritaskan. Hal ini menyebabkan banyaknya anak nelayan yang tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak.

Berdasarkan salah satu penelitian, menyebutkan bahwa nelayan di pesisir Kota Surabaya berpendapat bahwa potensi laut yang besar belum sebanding dengan daya eksplorasi nelayan. Nelayan rata-rata hanya mampu menangkap ikan dengan modal kecil dan dilakukan secara tradisional sehingga pendapatan tidak pasti dan cenderung kecil. Permasalahan lain adalah rata-rata nelayan di pesisir Kota Surabaya tidak ingin menangkap ikan di laut lepas. Rata-rata nelayan hanya melaut dengan jarak dibawah 1 mil dengan waktu kira-kira 2-3 jam dan maksimal bekerja selama 20 hari. Masyarakat nelayan di pesisir Kota Surabaya juga masih menyesuaikan dengan adanya pasang surut air laut.

Masyarakat nelayan di pesisir Kota Surabaya umumnya mengenal 2 musim yang menjadi landasan melaut, yaitu musim perapu (musim tangkap ikan) dan musim paceklik. Saat mengalami musim paceklik, masyarakat

nelayan di pesisir Kota Surabaya akan berusaha untuk memenuhi kehidupan keluarganya dengan mata pencaharian lain, misalnya menjadi buruh pabrik, dan pekerjaan kasar lainnya (Kalimang, 2015).

Profil perikanan (Dinas Pertanian Kota Surabaya, 2012) menggambarkan bahwa sebagian besar nelayan Kota Surabaya merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang cukup memprihatinkan. Realitas permasalahan yang terjadi pada pesisir Kota Surabaya adalah permasalahan sosial, ekonomi, dan ekologi. Selain itu nelayan di wilayah pesisir Kota Surabaya juga mengalami keterbatasan akses sumberdaya manusia, hal ini dilihat dari persentase masyarakat nelayan di pesisir kota yang $\pm 45\%$ tingkat pendidikan terakhir didominasi oleh Tidak Sekolah dan SD, dan pendidikan suami maupun istri nelayan di wilayah pesisir Kota Surabaya mayoritas tamatan SD (Gai, 2017).

Rendahnya kualitas sumberdaya manusia nelayan di wilayah pesisir Kota Surabaya berimplikasi pada rendahnya produktifitas nelayan, di mana pendapatan nelayan di pesisir timur Surabaya 29,30% berada dibawah UMK Surabaya, dengan pengeluaran diatas Rp1.200.000,00. Kondisi rumah keluarga nelayan 34,80% rumah masih semi permanen dengan 49% rumah tangga memiliki aset tidak lengkap karena akan memerlukan biaya selama penggunaan dan perawatan, misalkan perahu dan sepeda motor memerlukan bahan bakar, tv atau radio butuh biaya listrik, dan handphone sebagai sarana komunikasi juga menghabiskan biaya untuk pembelian pulsa (Harlianingtyas, Kusri, dan Susilaningrum, 2013).

2.3 Karakteristik Permukiman di Kawasan Pesisir

Permukiman diartikan sebagai suatu wadah fisik (perumahan) dengan sarana prasarana penunjangnya dan merupakan perpaduan antara wadah dan isinya, yakni manusia yang hidup bermasyarakat didalamnya dan memiliki unsur budaya (Sudharto, 2005).

Menurut Kusnadi (2002), nelayan merupakan salah satu bagian dari masyarakat yang mempunyai tingkat kesejahteraan paling rendah, atau paling miskin dibanding masyarakat subsisten lainnya. Begitu pula Nugraha (2014) menyatakan bahwa sumber daya manusia di bidang perikanan yang memiliki kualitas rendah menyebabkan rendahnya produktivitas, yang berakibat pada rendahnya pendapatan, dan kemiskinan nelayan.

Masalah yang terdapat di permukiman nelayan pada wilayah kota adalah kurang terpeliharanya lingkungan yang ada di pesisir pantai, wilayah daratan, dan wilayah laut. Tata kelola perumahan yang tidak baik, mempengaruhi kondisi wilayah perairan sekitarnya, yang tentunya akan merusak biota laut (Hilakore et al., 2004).

Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh WALHI pada tahun 2008, permukiman nelayan di Indonesia memiliki permasalahan rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat pesisir dan kualitas lingkungan. Sedangkan untuk tingkat kesejahteraan masyarakat cukup rendah, yang diperlihatkan dari sebaran kawasan tertinggal yang terdapat wilayah pesisir. Salah satu yang menyebabkan adalah minimnya prasarana dan sarana pendukung bidang kelautan dan perikanan. Sedangkan untuk rendahnya kualitas lingkungan pada kawasan permukiman nelayan disebabkan minimnya ketersediaan prasarana dan sarana dasar, sehingga juga berdampak pada rendahnya produktivitas.

Keberadaan lingkungan perumahan/permukiman di kawasan pesisir apabila ditelusuri dari awal munculnya, dapat dibedakan atas 2 (dua) kronologis, yaitu:

- a. Perumahan/permukiman kawasan pesisir yang muncul berkembang mulai dari kedatangan kelompok dengan etnis tertentu di suatu kawasan pesisir, kemudian menetap dan berkembang secara turun-temurun, sehingga membentuk komunitas tertentu dan bersifat sangat homogen, tertutup dan mengembangkan tradisi dan nilai-nilai

tertentu. Sehingga pada akhirnya hal tersebut menjadi karakter dan ciri khas permukiman tersebut.

- b. Perumahan/permukiman kawasan pesisir yang berkembang sebagai daerah alternatif permukiman. Hal ini dikarenakan peningkatan arus urbanisasi yang memberikan dampak kawasan pesisir menjadi liar dan kumuh.

Permukiman nelayan adalah merupakan lingkungan tempat tinggal dengan sarana dan prasarana dasar yang sebagian besar penduduknya merupakan masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan dan memiliki akses dan keterikatan erat antara penduduk permukiman nelayan dengan kawasan perairan sebagai tempat mereka mencari nafkah, meskipun demikian sebagian dari mereka masih terikat dengan daratan. Secara umum permukiman nelayan dapat digambarkan sebagai suatu permukiman yang sebagian besar penduduknya merupakan masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan. Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15/Permen/M/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Kawasan Nelayan, perumahan kawasan nelayan untuk selanjutnya disebut kawasan nelayan adalah perumahan kawasan khusus untuk menunjang kegiatan fungsi kelautan dan perikanan.

Karakteristik permukiman nelayan berdasarkan Departemen Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya (2012) adalah sebagai berikut :

- a. Permukiman nelayan merupakan kumpulan dari satuan perumahan yang memiliki kelengkapan sarana dan prasarana pendukung permukiman
- b. Permukiman berbatasan langsung dan memiliki aksesibilitas yang baik terhadap kawasan perairan
- c. Penduduk yang bermatapencaharian sebagai nelayan atau pekerjaan lain yang berkaitan dengan pengolahan dan penjualan ikan memiliki presentase lebih besar dari 60%

- d. Tersedianya sarana yang diperlukan dalam kegiatan penangkapan ikan serta kegiatan pengolahannya.

Sedangkan Syahriarto (2013), berpendapat bahwa karakteristik permukiman nelayan yang ideal antara lain:

- a. Permukiman nelayan merupakan kumpulan dari satuan-satuan lingkungan perumahan
- b. Tersedianya prasarana dan sarana lingkungan ideal dan sesuai kebutuhan dan jumlah masyarakat nelayan
- c. Kawasan permukiman memenuhi prinsip standar layak huni, antara lain memenuhi persyaratan teknis, administrasi dan lingkungan.

Umbara (2003) memberikan pendapat bahwa permukiman nelayan memiliki ciri khas, seperti penggunaan papan atau bambu sebagai dinding dan seng sebagai atap pada rumah-rumah nelayan yang masih non-permanen atau semi permanen. Selain itu, terdapat kawasan permukiman yang berbahan baku kayu dan menggunakan model panggung. Model panggung pada umumnya digunakan pada kawasan yang rawan banjir rob saat musim angin barat.

Pendapat lain mengenai karakteristik permukiman nelayan diungkapkan oleh Amri (2001). Permukiman nelayan menurut Amri (2001) pada umumnya berada dalam kondisi kumuh, dibangun berdekatan dengan luasan rumah yang sempit di sepanjang area pantai. Selain itu, kawasan permukiman memiliki sistem persampahan dan sanitasi yang buruk, termasuk pembuangan sisa limbah dari pengolahan ikan yang menimbulkan polusi udara di kawasan sekitarnya.

Ramdani dan Ragil (2013) memberikan pendapat yang senada mengenai karakteristik permukiman nelayan. Dimana permukiman nelayan memiliki permasalahan dalam penataan ruang yang ideal. Luas lahan untuk pembangunan kecil, namun memiliki kepadatan bangunan tinggi dan berkualitas rendah. Hal ini memicu tingginya kerentanan penyakit sosial dan lingkungan.

Menurut Winoto (2006) tentang karakteristik permukiman nelayan adalah permukiman yang berada di atas air dan memiliki kepadatan bangunan tinggi. Selain itu kawasan permukiman nelayan terkesan kumuh dimana bangunan terbangun tidak teratur dan dalam kondisi kotor. Bangunan yang ada di kawasan permukiman nelayan menurut Winoto (2006) pada umumnya menggunakan struktur dan konstruksi yang sederhana dan tradisional, sehingga faktor angin, tsunami, gempa dan bencana alam lain tidak diperhitungkan. Hingga saat ini, perkembangan kampung-kampung nelayan semakin padat dan masih belum tertata karena pertumbuhan penduduk alami dan urbanisasi.

Pada kawasan pesisir di Kota Surabaya permukiman masyarakat nelayan berupa perkampungan yang padat. Hal ini membawa suasana kekerabatan yang lebih erat antar anggota masyarakat. Rata-rata rumah di permukiman nelayan berupa rumah produktif, yaitu rumah yang sebagian penggunaan ruang dalam rumah digunakan untuk fungsi produktif atau kegiatan ekonomis, yang menimbulkan konsekuensi adanya hubungan antara aspek produksi dan perawatan rumah. Permukiman nelayan di pesisir Kota Surabaya masih memiliki potensi pengembangan sebagai kawasan wisata nelayan dikarenakan rumah yang dihuni rata-rata masih berupa rumah khas nelayan, dan para nelayan masih menggunakan cara tradisional untuk melaut. Namun yang menjadi permasalahan utama pada permukiman nelayan adalah kondisi lingkungan permukiman yang kotor. Selain itu masih banyak rumah semi permanen yang belum memenuhi standar layak huni (Dharmawan, 2016).

2.4 Karakteristik Bermukim dan Perilaku Masyarakat di Kawasan Pesisir

Rendahnya tingkat pendidikan pada masyarakat pesisir yang bekerja di sektor kelautan seperti nelayan, pembudidaya ikan, penambang pasir maupun

transportasi laut merupakan salah satu faktor dalam menentukan karakteristik bermukim dan perilaku masyarakat di kawasan pesisir. Penataan lingkungan di sekitar kawasan permukiman nelayan pada umumnya juga masih buruk dan kumuh. Selain itu, kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir berada pada tingkat kesejahteraan yang rendah. Karakteristik ini akan berakibat pada masa mendatang, dimana tekanan terhadap sumber daya yang ada di kawasan pesisir akan semakin besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pesisir.

Pengembangan kawasan pesisir didasarkan kawasan pesisir menyimpan potensi sumber daya alam yang cukup besar dan juga diharapkan memiliki potensi sosial masyarakat yang akan mengelola sumberdaya alam secara berkelanjutan. Potensi masyarakat menjadi sangat penting karena sebagian besar penduduk yang tinggal di pesisir, hidup dari pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Kebijakan pembangunan di bidang perikanan (revolusi biru) yang telah dilakukan selama beberapa dekade menunjukkan masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir.

Menurut Nasution (2005) ada beberapa faktor yang perlu perhatian khusus dalam mengelola wilayah pesisir dan laut, antara lain :

1. Penataan Ruang

Faktor ini berkaitan dengan kebijakan yang mengatur jenis penggunaan lahan yang ada di pesisir pantai, termasuk penetapan kriteria penentuan fungsi kawasan dan perubahannya yang dituangkan dalam penyusunan dokumen rencana tata ruang.

2. Lingkungan

Faktor ini berkaitan dengan pengembangan ekosistem pesisir secara keseluruhan. Terutama pada hal yang terkait dengan permasalahan lingkungan di kawasan pesisir.

3. Permukiman

Faktor permukiman harus melalui suatu perencanaan yang matang dan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat nelayan

pesisir. Hal ini akan membantu menciptakan pola permukiman yang layak dan ideal serta sesuai dengan kebijakan penataan ruang.

4. Sarana dan prasarana

Faktor sarana dan prasarana yang ada di kawasan pesisir saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga diperlukan pembangunan sarana dan prasarana yang lebih merata sehingga dapat dijangkau dari seluruh kawasan pesisir.

5. Sumber air bersih

Faktor sumber air bersih perlu menggunakan teknologi yang tepat guna untuk mengatasi kelangkaan air bersih yang pada umumnya terjadi di kawasan pesisir. Kelangkaan ini juga dipengaruhi oleh tingginya kepadatan penduduk di kawasan pesisir, yang mempengaruhi tingginya tingkat penggunaan air bersih.

6. Pariwisata

Faktor ini merupakan kesempatan dari sektor ekonomi lainnya yang perlu dikelola dengan tepat agar dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Selain itu faktor pariwisata perlu memanfaatkan masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir sebagai pelaku kegiatan pariwisata. (Nasution, 2005).

Berdasarkan beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan permukiman di kawasan pesisir, diperlukan adanya formulasi perbaikan kehidupan masyarakat nelayan. Pernaikan ini ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup, sumber daya manusia serta keberlangsungan hidup ekosistem di kawasan pesisir.

Salah satu perilaku yang identik dengan masyarakat nelayan adalah tingkat pendidikan yang rendah, sehingga menyebabkan kurangnya pengetahuan dan menghambat kemajuan nelayan itu sendiri, antara lain sulitnya bagi pemerintah untuk memberi bantuan dalam bentuk penyuluhan maupun modernisasi peralatan (Mubyarto, 1985).

Namun terdapat hubungan sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat nelayan yang diakibatkan interaksi dengan lingkungannya, dimana ciri sosial masyarakat nelayan sebagai berikut:

1. Sikap kekerabatan atau kekeluargaan yang sangat erat
2. Sikap gotong royong/paguyuban yang tinggi

Kedua sikap telah banyak mewarnai kehidupan masyarakat nelayan yang pada umumnya masih bersifat tradisional. Lahirnya sikap ini sebagai akibat dari aktivitas nelayan yang sering meninggalkan keluarganya dalam kurun yang waktu cukup lama, sehingga timbul rasa keterkaitan serta keakraban yang tinggi antara keluarga-keluarga yang ditinggalkan untuk saling tolong menolong (Asriadi, 2018).

Beberapa hal yang telah membudaya dalam masyarakat nelayan adalah kecenderungan hidup lebih dari satu keluarga dalam satu rumah atau mereka cenderung untuk menampung keluarga serta kerabat mereka dalam waktu yang cukup lama, hal ini menyebabkan sering dijumpai jumlah anggota keluarga dalam satu rumah melebihi kapasitas daya tampung, sehingga ruang gerak menjadi sempit dan terbatas. Dan dampaknya itu pula, mereka cenderung untuk memperluas rumah tanpa terencana.

Menurut Khatiwada (2017), ciri-ciri masyarakat nelayan yaitu rendahnya tingkat pendudukan dan kondisi sosial ekonomi, ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang memadai, banyaknya bangunan liar dan kondisi lingkungan yang cenderung kumuh.

Para masyarakat nelayan hidup dalam kondisi lingkungan yang terbatas dan miskin. Hal ini juga dipengaruhi dari pembatasan mobilitas dan pendapatan yang tidak pasti karena masyarakat nelayan melaut bergantung pada musim. Hal ini menjadi sebab dasar pendapatan nelayan yang fluktuatif, selain itu yang dapat menjadi penyebab rendahnya pendapatan nelayan adalah kepemilikan aset, seperti penguasaan alat tangkap (perahu/kapal dan kelengkapannya).

Ma (2018) mengungkapkan bahwa rumah tangga nelayan memiliki ciri khusus yang melekat. Ciri tersebut antara lain :

- a. Rumah tangga nelayan merupakan bangunan sederhana dan tidak memiliki banyak barang
- b. Memiliki kualitas pendidikan dan kesehatan yang kurang baik
- c. Pada umumnya rumah tangga nelayan kurang produktif
- d. Tidak memiliki ketrampilan yang cukup baik
- e. Kurang memiliki kesempatan dalam peningkatan pengetahuan serta berperan dalam pembangunan

Ciri lain rumah tangga nelayan berdasarkan Umbara (2003) adalah pendapatan yang rendah yang menjadi penentu tingkat perekonomian. Dimana pendapatan rendah ini tidak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan saat mencari ikan. Hal lainnya yang menjadi penyebab tingkat perekonomian yang rendah adalah sistem perdagangan pada sektor perikanan yang belum berpihak pada masyarakat nelayan, dimana yang cenderung terjadi adalah semakin melimpah hasil ikan, harga yang didapat semakin menurun.

Umbara (2003) mengungkapkan bahwa dalam rumah tangga nelayan, memiliki kemampuan gotong royong yang baik. Hal ini didukung oleh pernyataan Budiharjo (2006) yang mengungkapkan bahwa :

“nilai sosial yang berlaku dikalangan masyarakat berpenghasilan rendah adalah keakraban yang besar diantara mereka, sehingga kedekatan fisik bangunan meninggalkan kesan perasaan bersatu dan jarak bangunan yang terlalu dekat menimbulkan kesan yang ramai.”

Dampak yang timbul dengan adanya sistem gotong royong yang baik ini, berpengaruh terhadap bagaimana keluarga nelayan memperlakukan keluarga besar. Dengan adanya keluarga besar, penambahan jumlah keluarga menjadi tidak dapat dihindari, akibatnya penghuni rumah tangga nelayan semakin banyak sedangkan luas bangunan masih tetap. Hal ini menurut

Budiharjo (2006) memberikan ciri khas kekeluargaan yang erat dan membentuk pola yang unik dalam tata cara bermukim rumah tangga nelayan.

Crawford (1999) memberikan pendapat bahwa pada tempat berkembangnya kawasan permukiman nelayan, terbentuk karakteristik ekonomi, sosial dan budaya tertentu. Karakteristik tersebut antara lain :

1. Kawasan permukiman nelayan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi
2. Masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir memiliki pergerakan yang dapat berorientasi ke perairan maupun ke daratan
3. Masyarakat di kawasan pesisir pada umumnya merupakan memiliki tingkat pendidikan rendah dan masuk dalam kategori keluarga dengan golongan ekonomi lemah
4. Rendahnya tingkat pendidikan berpengaruh kepada pengetahuan tentang kesadaran lingkungan dan pengetahuan untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik
5. Permukiman pesisir dapat menjadi salah satu peninggalan sejarah dan budaya pada suatu kawasan
6. Pada beberapa kawasan pesisir, terdapat masyarakat yang secara turun temurun terbiasa hidup diatas air atau bahkan memanfaatkan air sebagai media transportasi utama
7. Permukiman nelayan pada umumnya berada pada pola permukiman dengan akses terbuka, sehingga berpengaruh pada tingkat keamanan yang ada di kawasan permukiman tersebut

Umbara (2003) mengungkapkan bahwa terdapat ciri khusus mengenai kondisi sosial masyarakat nelayan. Hal pertama yang menjadi ciri adalah tingginya angka kelahiran. Hal ini dipengaruhi dari kebiasaan masyarakat yang menikah di usia muda dan rendahnya kesadaran penggunaan KB (Keluarga Berencana). Ciri kondisi sosial lain menurut Umbara (2003) adalah adanya tradisi-tradisi tertentu dalam melaut. Misalnya saja ada nelayan yang tidak melaut di hari jumat atau hari yang bertepatan dengan 1

Muharram. Pada beberapa masyarakat nelayan, pada peringatan 1 Muharram akan mengadakan upacara labuh laut atau sedekah laut. Upacara ini merupakan tradisi membuat sesaji yang akan dilabuhkan ke tengah laut sebagai bentuk syukur atas rezeki yang telah diterima, dan sebagai bentuk doa keselamatan saat melaut.

Perilaku masyarakat nelayan di pesisir Kota Surabaya yang menonjol adalah adanya interaksi antara warga, hal ini selalu terjadi dengan rutin, misalnya tatap muka dalam sepekan. Hal ini tetap terlaksana walaupun ada perbedaan suku, yaitu suku Jawa dan suku Madura. Selain itu masyarakat yang ada di kawasan pesisir Kota Surabaya dalam kehidupan sehari – hari masih mengutamakan asas gotong royong dan pada umumnya bersifat swadaya serta atas kerelaan dari masyarakat.



Pengembangan Kawasan Pesisir di Perkotaan

3.1 Pengembangan Kawasan Pesisir dan Permukiman Nelayan

Permukiman nelayan merupakan permukiman yang terdiri atas satuan-satuan perumahan yang memiliki berbagai sarana dan prasarana yang mendukung kehidupan dan penghidupan penghuninya. Berdekatan atau berbatasan langsung dengan perairan, dan memiliki akses yang tinggi terhadap kawasan perairan. 60% dari jumlah penduduk merupakan nelayan, dan pekerjaan lainnya yang terkait dengan pengolahan dan penjualan ikan. Memiliki berbagai sarana yang mendukung kehidupan dan penghidupan penduduknya sebagai nelayan, khususnya dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan eksplorasi ikan dan pengolahan ikan.

Kawasan permukiman nelayan tersusun atas satuan-satuan lingkungan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan yang sesuai dengan besaran satuan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kawasan perumahan nelayan haruslah mempunyai ataupun memenuhi prinsip-prinsip layak huni yaitu memenuhi persyaratan teknis, persyaratan administrasi, maupun persyaratan lingkungan. Dari berbagai parameter tentang permukiman dan karakteristik nelayan dapat dirumuskan bahwa permukiman nelayan merupakan suatu lingkungan masyarakat dengan sarana dan prasarana yang mendukung, dimana masyarakat tersebut mempunyai keterikatan dengan sumber mata pencaharian mereka sebagai nelayan (Kusnadi, 2013).

Menurut Wastuti (2014), tahapan perkembangan kawasan perumahan/permukiman di pesisir adalah:

- a. Tahap awal ditandai oleh dominasi pelayanan kawasan perairan sebagai sumber air untuk keperluan hidup masyarakat. Masih berupa suatu kelompok permukiman di pantai dan di atas air.
- b. Ketika kota membutuhkan komunikasi dengan lokasi lainnya (kepentingan perdagangan) maka kawasan perairan merupakan prasarana transportasi dan dapat diduga perkembangan fisik kota yang cenderung memanjang di pantai (linear).
- c. Perkembangan selanjutnya ditandai dengan semakin kompleksnya kegiatan fungsional, sehingga intensitas kegiatan di sekitar perairan makin tinggi. Jaringan jalan raya menawarkan lebih banyak kesempatan mengembangkan kegiatan. Walaupun begitu, jenis fungsi perairan tidak berarti mengalami penurunan, bahkan mengalami peningkatan (makin beragam).

Berdasarkan kondisi topografi, pola perumahan dibedakan atas 3 (tiga) lokasi, yaitu:

- a. Daerah perbukitan cenderung mengikuti kontur tanah.
- b. Daerah relatif datar cenderung memiliki pola relatif teratur, yaitu pola Grid atau Linear dengan tata letak bangunan berada di kiri kanan jalan atau linear sejajar dengan (mengikuti) garis tepi pantai.
- c. Daerah atas air pada umumnya cenderung memiliki pola cluster, yang tidak teratur dan organik. Pada daerah-daerah yang telah ditata umumnya menggunakan pola grid atau linear sejajar garis badan perairan.

Kawasan permukiman nelayan berkembang cenderung diatas air maupun di sepanjang jalur pesisir. Kawasan muncul secara sporadis dan spontan sehingga permukiman cenderung tidak tertata dengan baik. Sarana dan prasarana yang dikembangkan juga tidak dapat dimanfaatkan dengan tepat dikarenakan penataan kawasan yang masih tidak sesuai dengan standar kelayakan huni (Kusnadi, 2013).

Berdasarkan permasalahan dalam pengembangan kawasan pesisir, diperlukan adanya susunan program yang sesuai untuk dikembangkan di wilayah pesisir dan permukiman nelayan. Menurut Kusnadi (2012), program-program yang akan dikembangkan, sebaiknya memiliki beberapa tujuan antara lain:

- a. Menciptakan kawasan permukiman nelayan perkotaan yang layak, aman, nyaman sehat tertib dan teratur.
- b. Meningkatkan kualitas kawasan permukiman nelayan perkotaan untuk mencapai kondisi sosial ekonomi masyarakat yang lebih baik.
- c. Mengembangkan kawasan permukiman nelayan baru yang wawasan lingkungan dan mengutamakan keberpihakan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam mendapatkan pelayanan infrastruktur
- d. Terpenuhinya pelayanan infrastruktur yang memadai bagi kawasan permukiman nelayan perkotaan

Sehingga sesuai dengan tujuan yang dapat dikembangkan dalam kawasan pesisir dan permukiman nelayan, terdapat strategi pengembangan kawasan permukiman nelayan yang dapat diterapkan, yaitu :

- a. Melakukan pengembangan dan implementasi produk yang mengatur pengembangan kawasan pesisir dan permukiman nelayan di perkotaan
- b. Melakukan pemantapan serta peningkatan pemahaman dan kemampuan pemerintah daerah dalam upaya pengembangan kawasan pesisir dan permukiman nelayan di perkotaan (pembangunan kawasan baru atau peningkatan kualitas permukiman yang kumuh)
- c. Melakukan pengembangan kawasan pesisir dan permukiman nelayan di perkotaan (permukiman baru dan eksisting). Pengembangan dilakukan dengan mengutamakan aspek lingkungan dan mengutamakan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam mendapatkan pelayanan infrastruktur

- d. Melakukan pengembangan kawasan pesisir dan permukiman nelayan di perkotaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat

Kriteria fisik lingkungan kawasan permukiman nelayan secara ideal berdasarkan Kementerian Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

1. Tidak berada pada daerah rawan bencana
2. Tidak berada pada wilayah sempadan pantai dan sungai
3. Kelerengan : 0 – 25 %
4. Orientasi horizontal garis pantai : $> 60^0$
5. Kemiringan dasar pantai : terjal – sedang
6. Kemiringan dataran pantai : bergelombang – berbukit
7. Tekstur dasar perairan pantai : kerikil – pasir
8. Kekuatan tanah daratan pantai : tinggi
9. Tinggi ombak signifikan : kecil
10. Fluktuasi pasang surut dan arus laut : kecil
11. Tidak berada pada kawasan lindung
12. Tidak terletak pada kawasan budidaya penyangga, seperti kawasan mangrove.

Salah satu pendekatan pembangunan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan dalam pengembangan kawasan pesisir dan pengembangan permukiman nelayan adalah pembangunan berkelanjutan. Istilah pembangunan berkelanjutan telah memasuki perbendaharaan kata para ahli serta masyarakat setelah diterbitkannya laporan mengenai pembangunan, lingkungan dan sumberdaya alam.

Laporan ini diterbitkan oleh Komisi Dunia untuk Lingkungan Hidup dan Pembangunan - PBB (*UN World Commission on Environment and Development - WCED*) yang diketuai oleh Harlem Brundtland, dalam laporan tersebut didefinisikan istilah pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

“Pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan generasi yang akan datang untuk dapat memenuhi kebutuhannya.”

Selain itu, dikatakan bahwa pada tingkat yang minimum, pembangunan berkelanjutan tidak boleh membahayakan sistem alam yang mendukung semua kehidupan di muka bumi.

Pada lingkungan pesisir dan permukiman nelayan, hal ini sangat diperlukan. Mengingat rentannya kondisi pesisir akibat besarnya potensi sumber daya alam namun tidak terkelola dengan baik. Sehingga pendekatan keberlanjutan ini perlu digaungkan dalam rangka memperbaiki kondisi alam sekaligus memperbaiki kondisi sosial masyarakat di kawasan pesisir maupun di permukiman nelayan.

3.2 Proses Pengembangan Kawasan Pesisir dan Permukiman Nelayan

Pembangunan kawasan pesisir berdasarkan Wiyana (2004) dapat dikatakan berkelanjutan, apabila terdapat pembangunan yang secara ekonomis, ekologis serta sosial politik yang juga bersifat berkelanjutan. Ekonomi yang berkelanjutan menurut Wiyana (2004) merupakan pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan, sekaligus pemeliharaan kapital serta penggunaan sumber daya dan investasi yang efisien. Sedangkan keberlanjutan dalam konsep ekologi adalah pembangunan yang dilakukan memperhatikan ekosistem, daya dukung lingkungan serta kemampuan untuk mengkonservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Selanjutnya adalah berkelanjutan secara sosial politik. Berkelanjutan secara sosial politik menurut Wiyana (2004) adalah hasil pembangunan yang dilakukan dapat dirasakan merata di seluruh masyarakat, terbentuknya mobilitas, kohesi dan identitas sosial, adanya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat serta ada pengembangan kelembagaan.

Pendapat lain menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini, namun tidak mengabaikan kemampuan generasi selanjutnya dalam memenuhi kebutuhan mereka. Pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai proses perubahan dalam pemanfaatan sumber daya, arah investasi, orientasi pembangunan dan perubahan kelembagaan dalam kondisi yang seimbang dan saling memperkuat antar sektor secara sinergis dari saat ini hingga di masa depan. Sehingga apabila ini terjadi, kebutuhan dan aspirasi masyarakat dapat terjaga (Brundtland dalam Budihardjo dan Sujarto, 1999).

Kay dan Alder (1999) menyatakan bahwa pengertian pembangunan berkelanjutan pada wilayah pesisir merupakan batasan wilayah daratan dan perairan dimana proses kegiatan dan aktivitas di daratan dan perairan saling mempengaruhi.

Menurut Fauzi (2004) terdapat prinsip dalam penerapan konsep keberlanjutan, yang dapat dibagi menjadi tiga aspek, antara lain :

1. Keberlanjutan ekonomi

Keberlanjutan dalam aspek ekonomi diartikan sebagai pembangunan yang menghasilkan barang dan jasa secara terus menerus dalam rangka memelihara keberlanjutan pemerintahan dan menghindari adanya ketimpangan sektoral yang dapat berpotensi mempengaruhi produksi pertanian dan proses industri

2. Keberlanjutan lingkungan

Keberlanjutan dalam aspek lingkungan adalah kemampuan pemeliharaan sumber daya yang konsisten, tidak mengeksplorasi sumber daya alam berlebihan dan mempertahankan fungsi lingkungan. Aspek lingkungan juga terkait dengan mempertahankan keanekaragaman hayati, memelihara kualitas udara serta fungsi ekosistem lain yang tidak masuk dalam sumber ekonomi

3. Keberlanjutan sosial

Aspek keberlanjutan sosial dapat diartikan sebagai kemampuan dalam mencapai kesetaraan, penyediaan layanan sosial kesehatan, pendidikan, gender serta akuntabilitas politik.

Pendapat dari Muttaqiena (2009) memberikan perhatian lebih terhadap isu lingkungan, dinyatakan bahwa perencanaan dalam pembangunan pesisir yang dilakukan secara terpadu, perlu memperhatikan tiga prinsip pembangunan berkelanjutan. Prinsip tersebut antara lain :

1. Prinsip ekonomi lingkungan

Maksud dari prinsip ini adalah parameter lingkungan masuk dalam perhitungan analisis biaya manfaat (*cost benefit analysis*). Misalnya pembangunan industri di kawasan pesisir juga menghitung adanya pengelolaan limbah dan kelengkapan lingkungan lainnya.

2. Prinsip konservasi lingkungan

Maksud prinsip ini adalah melakukan konservasi dalam keanekaragaman hayati dan menjadikan konservasi sebagai isu utama dalam pengambilan keputusan

3. Prinsip kualitas hidup masyarakat

Maksud dalam kualitas hidup masyarakat adalah memperhatikan kualitas hidup yang diperlukan masyarakat dari saat ini hingga di masa mendatang. Misalnya saja penyediaan sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, menyediakan sanitasi yang baik serta kemampuan mitigasi bencana.

Berdasarkan permasalahan di kawasan pesisir maupun di permukiman nelayan, serta perkembangan yang ideal dalam kehidupan nelayan, maka kemiskinan masih merupakan masalah yang dihadapi dan harus diatasi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Kenyataan bahwa mata pencaharian nelayan merupakan pekerjaan yang masuk kedalam kategori pendapatan rendah, maka pilihan yang bijak adalah membangun ekonomi kawasan pesisir itu sendiri melalui pemanfaatan sumber-daya yang

dimiliki. Sehingga, diperlukan peningkatan produktivitas hasil penangkapan ikan (Kusnadi, 2012).

Namun, hal ini mengakibatkan dampak yang tidak diinginkan, yakni degradasi lingkungan hidup, seperti yang telah terjadi selama ini. Akibatnya, banyak biaya lingkungan yang harus ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat. Jika keadaan ini berjalan terus menerus, maka pembangunan ekonomi pesisir menjadi tidak berkelanjutan. Perlu adanya langkah untuk membangun ekonomi pesisir yang berwawasan lingkungan. Artinya pembangunan mengarah pada pengentasan kemiskinan yang sekaligus memperbaiki kualitas lingkungan di kawasan pesisir. Meskipun sangat sulit, tetapi tidak berarti mustahil. Sejalan dengan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, para nelayan yang merupakan penduduk di kawasan pesisir seharusnya bisa mulai peduli terhadap lingkungan hidup.

Secara teoritis, peningkatan pendapatan masyarakat nelayan dapat sejalan dengan usaha perbaikan lingkungan hidup di kawasan pesisir. Hal ini dapat dicapai dengan syarat bahwa masyarakat nelayan memahami pentingnya lingkungan hidup sebagai bagian dari kesejahteraan. Untuk mencapai ini, diperlukan tahapan-tahapan, antara lain mengenalkan informasi tentang pentingnya lingkungan, pendidikan dan latihan tentang lingkungan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat pesisir (Kusnadi, 2013).

3.3 Kajian Matriks Kawasan Pesisir dan Permukiman Nelayan di Kota Surabaya

Kondisi kawasan pesisir di Kota Surabaya masih belum sesuai dengan kondisi ideal. Hal ini dikarenakan masih munculnya permasalahan terkait sosial, ekonomi, alam dan faktor lain di kawasan pesisir.

Tabel 1. Matriks Perbandingan Kawasan Pesisir dan Permukiman Nelayan di Kota Surabaya

Modal	Permukiman Nelayan di Kota Surabaya	Kajian
Sosial	<p>Pada kawasan nelayan pesisir di Kota Surabaya, terbentuk keterikatan melalui proses rantai ekonomi. Keterikatan ini terjalin antara penangkap ikan hingga ke pedagang. Tingkat kepercayaan antar nelayan cukup erat, hal ini terlihat dari kemudahan antar nelayan untuk saling bekerja sama dan tolong menolong.</p> <p>Kelembagaan yang ada di kawasan nelayan pesisir masih kurang berfungsi dengan baik. Kelompok nelayan sebagai komunitas sosial masih kurang berperan dalam optimalisasi pemberdayaan ekonomi nelayan. Selain itu, unit simpan pinjam yang dikelola oleh koperasi lokal belum dapat menjangkau seluruh masyarakat nelayan.</p> <p>Kesadaran sosial masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dengan terlibat dalam kelembagaan atau organisasi nelayan masih rendah.</p>	<p>Menurut Suharto (2007), modal sosial dapat diartikan sebagai sumber (resource) yang timbul dari adanya interaksi antara orang-orang dalam komunitas. Pengukuran modal sosial sering dilakukan melalui hasil interaksi tersebut, seperti: terpeliharanya kepercayaan antar warga masyarakat. Interaksi dapat terjadi dalam skala individual maupun institusional. Dalam skala individual interaksi terjadi pada relasi intim antara individu yang menghasilkan ikatan emosional. Dalam skala institusional, interaksi terjadi pada saat beberapa organisasi memiliki kesamaan visi dan tujuan.</p> <p>Sehingga sesuai dengan indikator modal sosial yaitu organisasi nelayan, tingkat kepercayaan antar nelayan dan jaringan ikatan masyarakat, maka analisa pemberdayaan dalam modal sosial dalam rangka adaptasi perubahan iklim adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu adanya perbaikan sumber daya manusia untuk meningkatkan daya pikir dan kemauan dalam meningkatkan kesejahteraan 2. Perlu adanya perbaikan kondisi kelembagaan atau organisasi nelayan di kawasan pesisir, sehingga dapat menjadi wadah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat 3. Memanfaatkan keterikatan masyarakat antar nelayan untuk memberikan pengaruh baik mengenai peningkatan taraf hidup dan partisipasi dalam penghidupan berkelanjutan 4. Memanfaatkan forum keagamaan seperti pengajian yang diadakan rutin untuk memberikan pengetahuan tentang kualitas hidup yang layak dari sisi agama 5. Membantu membuka akses untuk penjualan hasil laut atau produk olahan ke luar daerah

Modal	Permukiman Nelayan di Kota Surabaya	Kajian
Alam	<p>Hasil perikanan yang mendominasi adalah udang, teripang, terung, ikan tongkol, ikan tuna dan lorjuk. Jumlah yang didapat ini belum dapat mencukupi kebutuhan masyarakat nelayan pesisir. Namun, potensi laut di kawasan pesisir Kota Surabaya masih tinggi, namun daya eksplorasi nelayan masih rendah.</p> <p>Kesehatan lingkungan di permukiman kawasan nelayan pesisir Kota Surabaya buruk. Kesehatan lingkungan ini dipengaruhi dari kumuhnya kawasan dan kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan masih minim. Selain itu, kondisi air bersih di kawasan nelayan pesisir juga buruk dan belum layak minum.</p>	<p>DFID (2000) memberikan pernyataan bahwa aspek penting yang perlu dicermati dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan adalah “Modal Alam”, hal ini dapat diartikan sebagai sumberdaya alam yang mengalir dan sumberdaya layanan yang sudah tersedia (seperti tanah, air, hutan, kualitas udara, perlindungan erosi, keanekaragaman hayati, dll) hal ini berguna dalam persediaan sumber mata pencaharian yang ada.</p> <p>Sehingga sesuai dengan indikator modal alam yaitu kesehatan lingkungan, produksi air, kepemilikan tanah dan produksi perikanan, maka analisa pemberdayaan dalam modal alam dalam rangka adaptasi perubahan iklim adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran masyarakat tentang kesehatan lingkungan dan dampaknya perlu ditingkatkan. Hal ini akan mempengaruhi perilaku dan keseharian masyarakat 2. Menjaga kualitas air bersih dengan memberikan pengetahuan tentang tata cara penyaringan air mandiri, serta dampak yang muncul apabila mengkonsumsi air yang tidak layak minum 3. Memberikan contoh melalui organisasi atau tokoh masyarakat untuk meningkatkan hasil produksi perikanan dengan merubah pola tangkap 4. Meningkatkan daya eksplorasi nelayan 5. Memperbaiki ekosistem pesisir dengan mengajak masyarakat berkontribusi langsung, dan melakukan pemeliharaan ekosistem secara mandiri dan berkala
Fisik	<p>Nelayan pesisir Kota Surabaya saat ini rata-rata masih menggunakan alat tangkap tradisional berupa waring atau jaring hitam dan kapal kayu < 5 GT. Sehingga dengan kapasitas kapal yang kecil, nelayan hanya mampu</p>	<p>Kodoatie (2005) memberikan pengertian bahwa ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Maka infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan.</p> <p>Infrastruktur merupakan aset fisik yang</p>

Modal	Permukiman Nelayan di Kota Surabaya	Kajian
	<p>menangkap ikan secara tradisional dengan jarak 1 mil. Nelayan membeli bahan bakar yang digunakan untuk perahu secara ecer dan tidak menggunakan SPDN terdekat.</p> <p>Aksesibilitas nelayan dari dan menuju pusat kota sudah terpenuhi. Kondisi permukiman nelayan \pm 34,80% masih berupa semi permanen. Selain itu, lebih dari 40% rumah tangga memiliki aset tidak lengkap karena diperlukan adanya biaya selama penggunaan dan perawatan. Misalnya saja biaya untuk perawatan perahu, bahan bakar, biaya listrik untuk tv dan radio atau pembelian pulsa untuk sarana komunikasi.</p> <p>Kondisi sanitasi dan drainase lingkungan rata-rata sudah diperbaiki, namun masih bergantung pada kesadaran masyarakat nelayan untuk pemeliharaannya.</p>	<p>dirancang dalam sistem, sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang merujuk pada modal fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, sampah, sanitasi dan fasilitas publik yang lain.</p> <p>Sehingga sesuai dengan indikator modal fisik yaitu jumlah dan jenis alat, aksesibilitas, kondisi rumah, ketersediaan air bersih, kepemilikan kendaraan, kondisi sanitasi dan kondisi drainase, maka analisa pemberdayaan dalam modal fisik dalam rangka adaptasi perubahan iklim adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu adanya kajian teknis mengenai kapasitas kapal yang digunakan yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan juga dapat memenuhi kebutuhan nelayan sehari-hari 2. Infrastruktur yang diperlukan sudah disediakan oleh pemerintah daerah, seperti akses jalan, sanitasi dan drainase. Namun, perlu adanya pemeliharaan infrastruktur secara berkala. Masyarakat dapat diikutsertakan dalam proses pemeliharaan 3. Peningkatan kesadaran mengenai pentingnya infrastruktur juga harus dimiliki oleh masyarakat agar muncul rasa memiliki 4. Perlu adanya perbaikan dan penataan permukiman dan rumah agar lebih layak huni 5. Memberikan fasilitas perdagangan yang sesuai untuk jual beli hasil laut maupun produk olahan laut 6. Memanfaatkan komunitas untuk membentuk aksesibilitas politik dengan pemerintah daerah
Manusia	Rata-rata nelayan pesisir di Kota Surabaya masih belum mau menangkap di laut lepas. Rata-rata hanya berjarak 1 mil dengan lama waktu 2-3 jam. Hal ini juga masih	Fattah (2004) menyebutkan konsep modal manusia menganggap bahwa manusia merupakan suatu bentuk modal atau kapital sebagaimana bentuk-bentuk kapital lainnya, seperti mesin, teknologi, tanah, uang, dan material. Manusia sebagai human capital

Modal	Permukiman Nelayan di Kota Surabaya	Kajian
	<p>disesuaikan dengan adanya pasang surut air laut. Selain itu, nelayan di Kota Surabaya juga masih ada jeda melaut \pm 2 hari, sehingga kebutuhan sehari-hari masih belum mencukupi.</p> <p>Ketika masuk musim paceklik, maka nelayan akan berusaha memenuhi kebutuhans ehari-hari dengan mengandalkan mata pencaharian lainnya, misalnya buruh pabrik, berdagang, ojek, pengrajin kerang atau pekerjaan lainnya.</p> <p>Tingkat pendidikan di kawasan pesisir Kota Surabaya \pm 45% tidak bersekolah dan mayoritas tamatan SD [5]. Hal ini berdampak pada tingkat ketrampilan dan kemampuan kerja masyarakat nelayan pesisir.</p> <p>Pemberian adanya bantuan berupa kapal tangkap oleh Pemerintah Kota Surabaya tidak dapat digunakan secara maksimal, dikarenakan ketidakmampuan nelayan untuk mengikuti teknologi kapal yang diberikan.</p>	<p>tercermin dalam bentuk pengetahuan, gagasan (ide), kreativitas, keterampilan, dan produktivitas kerja. Tidak seperti bentuk kapital lain yang hanya diperlakukan sebagai tools, human capital ini dapat menginvestasikan dirinya sendiri melalui berbagai bentuk investasi SDM, diantaranya pendidikan formal, pendidikan informal, pengalaman kerja, kesehatan, dan gizi serta transmigrasi [9].</p> <p>Sehingga sesuai dengan indikator modal manusia yaitu tingkat pendidikan, ketrampilan dan kemampuan kerja, maka analisa pemberdayaan dalam modal manusia dalam rangka adaptasi perubahan iklim adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu adanya peningkatan ketrampilan dan kemampuan kerja, sehingga nelayan di pesisir Kota Surabaya mampu beradaptasi dengan teknologi terbaru pada bidang perikanan 2. Perlu adanya peningkatan pendidikan masyarakat untuk membuka kesempatan pekerjaan yang lebih sejahtera pada saat musim paceklik 3. Meningkatkan kemauan bekerja keras pada masyarakat dengan memanfaatkan program-program pemerintah maupun non-pemerintah 4. Melibatkan istri nelayan dalam pengelolaan hasil laut
Finansial	<p>Jumlah penangkapan ikan tongkol lebih kurang 4 kg, ikan tuna 6 kg, teripang 3 kg dan lorjuk 2 kg. Berdasarkan hasil tangkapan tersebut, setiap melaut pendapatan berkisar antara Rp 100.000,- hingga Rp 160.000,-. Sedangkan pengeluaran masyarakat nelayan untuk</p>	<p>Menurut Ekowati (2012), modal finansial adalah sumber-sumber dari mana dana diperoleh. Modal finansial mengacu pada dana yang diberikan oleh pemberi pinjaman (dan investor) atau dana yang disetor oleh pemilik untuk membeli peralatan modal riil untuk memproduksi barang.</p> <p>Sehingga sesuai dengan indikator modal finansial yaitu pendapatan sehari, pengeluaran,</p>

Modal	Permukiman Nelayan di Kota Surabaya	Kajian
	<p>kebutuhan sehari-hari saja diatas Rp 1.200.000,- setiap bulannya dengan tanggungan keluarga rata-rata 3 orang.</p> <p>Selain menjual hasil tangkapan secara langsung, masyarakat pesisir juga melakukan pengolahan ikan skala kecil seperti pengasinan, pengasapan ikan, pembuatan krupuk atau pembuatan terasi udang.</p>	<p>jumlah dan jenis tabungan yang dimiliki dan pinjaman, maka analisa pemberdayaan dalam modal finansial dalam rangka adaptasi perubahan iklim adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pengetahuan bahwa peningkatan jumlah pendapatan didasarkan pada kemauan dan kerja keras dari masyarakat 2. Pengaturan pengeluaran keuangan, dengan memberikan alokasi untuk biaya pendidikan 3. Memberikan program pinjaman bergulir untuk membantu masyarakat yang belum memiliki atau sedikit modal 4. Memperbaiki proses penjualan hasil laut untuk mengoptimalkan penghasilan nelayan

Sumber : Kajian Penulis, 2020



4 Kemiskinan di Kawasan Pesisir Perkotaan

4.1 Konsep Kemiskinan

Kemiskinan merupakan faktor kompleks dalam jajaran teori-teori mengenai kehidupan yang layak. Kemiskinan memiliki pengertian yang beragam sesuai dengan asumsi dan pendapat para ahli maupun lembaga-lembaga dunia. Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik.

Definisi kemiskinan yang dikemukakan oleh Chambers (1995) adalah definisi yang dapat diaplikasikan pada negara berkembang. Definisi kemiskinan menurut Chambers (1995), kemiskinan dipandang sbagai konsep lima dimensi, antara lain :

1. Kemiskinan (*proper*)

Dimensi kemiskinan yang dimaksud adalah pendapatan yang dihasilkan tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok. Dimana konsep ini berlaku pada kelompok yang tidak memiliki pendapatan maupun kelompok yang memiliki pendapatan.

2. Ketidakberdayaan (*powerless*)

Dimensi ketidakberdayaan adalah kekuatan sosial seseorang atau kelompok yang pada umumnya dipengaruhi oleh rendahnya kemampuan pendapatan, hal ini dapat berpengaruh pada kemampuan dalam memperoleh keadilan dan persamaan hak untuk memenuhi kehidupan yang layak sesuai prinsip kemanusiaan

3. Kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*)

Dimensi kerentanan ini merupakan seorang atau sekelompok orang yang masuk dalam kategori miskin dan tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga dimana situasi tersebut memerlukan alokasi pendapatan dalam penyelesaiannya. Misalnya, situasi bencana alam, melakukan pengobatan secara mendadak atau situasi darurat lain.

4. Ketergantungan (*dependency*)

Dimensi ketergantungan merupakan terbatasnya kemampuan pendapatan atau kekuatan sosial pada masyarakat kategori miskin, sehingga bergantung pada pihak lain sangat tinggi. Ketidakmampuan pendapatan dan rendahnya kekuatan sosial ini berpengaruh pada ketidakmampuan dalam menciptakan pendapatan baru, sehingga bantuan pihak lain sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

5. Keterasingan (*isolation*)

Dimensi keterasingan yang dimaksud adalah lokasi tinggal menjadi tolak ukur seseorang atau sekelompok masyarakat menjadi miskin. Pada umumnya masyarakat kategori miskin berada pada lokasi yang jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan fasilitas kesejahteraan lebih banyak berada pada pusat kegiatan ekonomi, sehingga akan sulit dijangkau oleh masyarakat kategori miskin.

Nugroho (1995) berpendapat bahwa kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup dapat menjadi tolak ukur miskin tau tidaknya kondisi masyarakat tersebut. Hal ini didukung oleh pendapat Suryawati

(2004), dimana secara prinsip standar hidup masyarakat tidak hanya berdasarkan kecukupan pangan, namun juga kecukupan pemenuhan kebutuhan kesehatan serta pendidikan. Tempat tinggal yang layak juga menjadi salah satu tolak ukur standar kesejahteraan hidup masyarakat. Sehingga masyarakat yang masuk dalam kategori miskin diartikan sebagai masyarakat yang memiliki pendapatan lebih rendah daripada rata-rata pendapatan, yang mengakibatkan kategori masyarakat tersebut tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Skema terbentuknya kemiskinan ini sesuai dengan konsep yang diungkapkan oleh Chambers (1995). Dimana gambaran bahwa kondisi pada negara berkembang dan dunia ketiga dianggap memiskinkan. Ciri pada kondisi ini adalah kemiskinan yang diukur berdasarkan rendahnya pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok. Sehingga berpengaruh pada rendahnya kemampuan konsumsi atau daya beli. Pernyataan ini didukung oleh Nugroho (1995) bahwa rendahnya daya beli untuk memenuhi kebutuhan pokok disebabkan oleh rendahnya pendapatan. Pernyataan tersebut juga berlaku pada saat perlu pemenuhan gizi maupun kesehatan yang dibatasi oleh rendahnya pendapatan. Hal ini yang menyebabkan kemampuan dalam pemenuhan kesejahteraan menjadi rendah, misalnya :

1. Terjadi gizi buruk yang mempengaruhi kerentanan terhadap penyakit menular akibat tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan serta standar gizi yang cukup
2. Kurangnya jaminan kesehatan sehingga rentan terhadap penyakit yang diiringi dengan kemampuan untuk menyembuhkan penyakit yang terbatas sehingga rentan terhadap resiko kematian
3. Keterbatasan pendapatan mengakibatkan bangunan yang ditinggali masyarakat tidak layak huni, sehingga dapat berdampak pada gangguan kesehatan dan lingkungan
4. Taraf pendidikan rendah yang disebabkan oleh rendahnya pendapatan, sehingga sulit untuk meningkatkan standar pendidikan

Kesimpulan yang dapat diambil adalah kondisi keterbatasan akibat rendahnya tingkat pendapatan menyebabkan rendahnya status kesehatan serta gizi masyarakat yang (morbiditas). Masyarakat pada kondisi ini mudah terserang penyakit dan terkena gizi buruk sehingga meningkatkan angka kematian (mortalitas).

Dampak dari tingginya angka mortalitas dan rendahnya kesehatan masyarakat adalah rendahnya partisipasi sosial, tingginya kuantitas ketidakhadiran, rendahnya kecerdasan serta rendahnya ketrampilan. Penjelasan dari masing-masing dampak yang terjadi menurut Wu (2019) adalah sebagai berikut :

1. Tingkat partisipasi sosial yang rendah

Rendahnya partisipasi sosial diawali dari kondisi kesehatan dan gizi yang tidak mencukupi sehingga ketahanan dan modal fisik juga tidak dapat terpenuhi. Gangguan kesehatan akan mempengaruhi tingkat partisipasi di lingkungan masyarakat maupun lingkungan kerja.

2. Jumlah ketidakhadiran meningkat

Rendahnya kualitas kesehatan akan mempengaruhi rendahnya jumlah kehadiran dalam aktivitas dalam lingkungan sosial. Sehingga berakibat pada hilangnya kesempatan untuk berperan aktif dalam lingkungan sosial tersebut.

3. Rendahnya tingkat kecerdasan

Rendahnya kualitas kesehatan atau gizi buruk akan berdampak pada kualitas intelektual masyarakat. Gizi yang baik diperlukan untuk meningkatkan kinerja otak manusia, sehingga dengan terjadinya gizi buruk di masyarakat akan berpengaruh terhadap rendahnya kualitas intelektual.

4. Tingkat ketrampilan yang rendah

Ketrampilan merupakan suatu bentuk tanda dari adanya kreativitas dalam seorang atau sekelompok masyarakat. Meningkatkan

kreativitas ini diperlukan kondisi kesehatan yang cukup serta kualitas intelektual yang baik. Hal ini juga diungkapkan oleh Suryawati (2004), yang menyatakan bahwa dukungan kesehatan perlu untuk meningkatkan pengembangan kreativitas yang akan berpengaruh langsung terhadap kesempatan dalam memperoleh peningkatan kualitas ketrampilan.

Suryawati (2004) mengungkapkan bahwa hingga saat ini, masalah kemiskinan dan penyebabnya masih menjadi perdebatan di tingkat akademis maupun penyusun kebijakan pembangunan. Satu dari beberapa faktor yang menjadi perdebatan adalah pengertian seorang atau sekelompok masyarakat masuk dalam kategori miskin. Identifikasi yang dilakukan pada umumnya melihat pada indikator pendapatan per kapita atau pengeluaran rata-rata yang merupakan indikator terukur. Sehingga perlu untuk mengetahui ciri kemiskinan yang sering digunakan hingga saat ini. Ciri tersebut antara lain :

1. Tidak adanya kepemilikan faktor produksi seperti modal, tanah, peralatan kerja atau ketrampilan
2. Rendahnya tingkat pendidikan
3. Pekerjaan dilakukan pada lingkup dan modal kecil atau sektor informal
4. Bertempat tinggal di kawasan *hinterland* yang jauh dari pusat kegiatan ekonomi atau berada di permukiman padat di tengah kota (*slum area*)
5. Rendahnya kesempatan kerja untuk memenuhi kebutuhan pokok, sehingga kesempatan untuk memiliki pelayanan kesehatan dan pendidikan yang baik dan sesuai standar kesejahteraan menjadi rendah

Sehingga, untuk memecahkan masalah kemiskinan secara berkelanjutan, diperlukan dukungan dari semua pihak yang memiliki kepentingan. Dukungan ini dilakukan pada kegiatan yang proaktif terhadap permasalahan kemiskinan agar dapat membentuk penanganan masalah

kemiskinan yang berkelanjutan. Beberapa langkah strategis untuk penanganan masalah kemiskinan adalah:

1. Mengembangkan Kesadaran Kritis dan Perilaku Pro-sosial

Yang dimaksud dengan kesadaran kritis adalah meningkatkan pemahaman mengenai realitas diri dan lingkungan seseorang atau lembaga. Sedangkan yang dimaksud perilaku pro-sosial adalah respon seseorang atau kelompok dalam permasalahan yang terjadi dengan pemikiran yang positif. Misalnya saja respon perasaan simpati yang memicu tindakan untuk menolong orang lain yang membutuhkan.

Berdasarkan kebijakan pemerintah, perseorangan atau kelembagaan, sama-sama memiliki kewajiban dalam meningkatkan kesadaran kritis maupun perilaku pro-sosial terutama pada masalah kemiskinan. Selain itu, kaitan dari aspek kesadaran kritis dan perilaku pro-sosial dapat dimanfaatkan dalam peningkatan angka kesejahteraan, penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kehidupan komunitas. Sehingga, baik perseorangan atau kelembagaan yang ada pada lingkungan tersebut memiliki sikap kritis dan perilaku pro-sosial yang meningkat, terutama pada penanganan masalah kemiskinan.

2. Penanggulangan Berbasis Pemetaan

Penanganan kemiskinan pada umumnya bersifat sporadis dan pada suatu masa saja, misalnya bagi-bagi uang pada masyarakat miskin, kemudian tidak ada tindak lanjut. Padahal permasalahan kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan memiliki variabel yang saling terkait. Permasalahan kemiskinan terdiri dari beragam bentuk, tidak hanya sebatas kekurangan pendapatan secara ekonomi, namun juga termasuk kerentanan, aksesibilitas, kelemahan fisik dan ketidakberdayaan.

Penyelesaian masalah kemiskinan dengan efektif dan efisien harus menggunakan langkah strategis. Salah satu prosesnya adalah pemetaan untuk mendapatkan identifikasi menyeluruh dan berkaitan antara

potensi, masalah serta solusi yang harus dilakukan. Pemetaan dilakukan dengan harapan dapat menginformasikan secara akurat mengenai ciri dan karakteristik masyarakat miskin dengan sistematis. Melalui sektor ekonomi dapat digambarkan pola sumber pendapatan, pola konsumsi, tingkat pengeluaran dari masyarakat miskin, jumlah tanggungan dalam rumah tangga maupun pengeluaran lainnya. Pada sektor sosial dapat tergambarkan tingkat pendidikan, kondisi kesehatan, akses pelayanan kesehatan dan air bersih, sanitasi lingkungan dan keamanan lingkungan masyarakat miskin. Pada aspek kependudukan akan digambarkan komposisi umur penduduk miskin, sebaran jumlah penduduk miskin hingga titik konsentrasi masyarakat miskin di perkotaan maupun pedesaan.

Hasil pemetaan akan menghasilkan aspek praktis yang implementatif, sehingga memudahkan kelompok atau pihak yang berkepentingan pada permasalahan kemiskinan untuk menentukan target dalam penyelesaian sumber masalah kemiskinan. Selain itu akan terdokumentasikan kegiatan dan proses pemetaan yang akan dipahami oleh kelompok masyarakat miskin itu sendiri. Proses ini penting karena secara tidak langsung akan disadari oleh masyarakat bahwa penanggulangan kemiskinan dilakukan dari dalam kelompok masyarakat sendiri. Sehingga hasilnya akan lebih berkelanjutan dibandingkan penyelesaian masalah kemiskinan yang didominasi oleh orang atau lembaga diluar kelompok masyarakat miskin itu sendiri.

3. Penguatan Kelembagaan

Kelembagaan yang dimaksud merupakan peraturan, norma atau nilai yang diberlakukan pada suatu wilayah dan dijadikan pedoman yang memiliki potensi dalam penyelesaian masalah kemiskinan. Bentuk peraturan, norma atau nilai dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah atau peraturan tertulis lainnya. Sedangkan peraturan

yang tidak tertulis seperti adat istiadat, kebiasaan atau tata nilai yang turun temurun.

Masalah kemiskinan dan kelembagaan memiliki keterkaitan yang erat, semakin kuat suatu lembaga akan semakin kecil kemungkinan terjadinya masalah kemiskinan pada wilayah atau kelompok tersebut. Sehingga perlu adanya penguatan nilai pada level komunitas atau kelompok secara keseluruhan dalam rangka penanganan masalah kemiskinan. Penguatan nilai kemanusiaan diperlukan untuk menggeser ke arah penanganan komunitas atau kelompok yang lebih baik. Hal ini dikarenakan saat ini hubungan sosial didasarkan atas keuntungan yang didapatkan dan kerugian dalam suatu hubungan yang dibangun. Fenomena kaburnya batas antara hak dan kewajiban dalam suatu komunitas atau kelompok, saat ini menjadi fenomena langka. Sedangkan disisi lain terdapat pemakluman pada perilaku tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gambaran kepedulian, keadilan, kepercayaan dan kejujuran sudah mulai menghilang di komunitas atau kelompok masyarakat. Apabila terjadi secara terus menerus, akan terjadi ketimpangan sosial yang memicu terjadinya kemiskinan.

Menurut Kusnadi (2013), pengembangan kawasan pesisir tidak hanya fokus pada potensi sumber daya alam, namun juga memberikan pertimbangan khusus pada potensi sosial masyarakat sebagai pengelola. Potensi sosial masyarakat ini penting karena besarnya jumlah penduduk yang tinggal di kawasan pesisir dan menggantungkan sumber kehidupan pada kawasan pesisir masih masuk dalam kategori miskin. Kebijakan yang sering dilaksanakan seperti revolusi biru, masih belum dapat membantu peningkatan standar kesejahteraan masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir.

Kusnadi (2012) juga memberikan beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Hal tersebut antara lain :

1. Penataan ruang

Berkaitan dengan pengaturan fungsi-fungsi di wilayah pesisir serta kebijakan dalam penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang dalam penyusunan dokumen penataan ruang

2. Lingkungan

Permasalahan lingkungan di wilayah pesisir dikaitkan dengan keterkaitan ekosistem. Hal ini dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat pesisir

3. Permukiman

Permukiman pada wilayah pesisir dilakukan dengan perencanaan yang sesuai dengan penataan ruang

4. Sarana dan Prasarana

Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana umum di kawasan pesisir sesuai dengan jumlah penduduk

5. Sumber Air Bersih

Penggunaan teknologi terapan untuk memenuhi kebutuhan air bersih sesuai dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah

6. Pariwisata

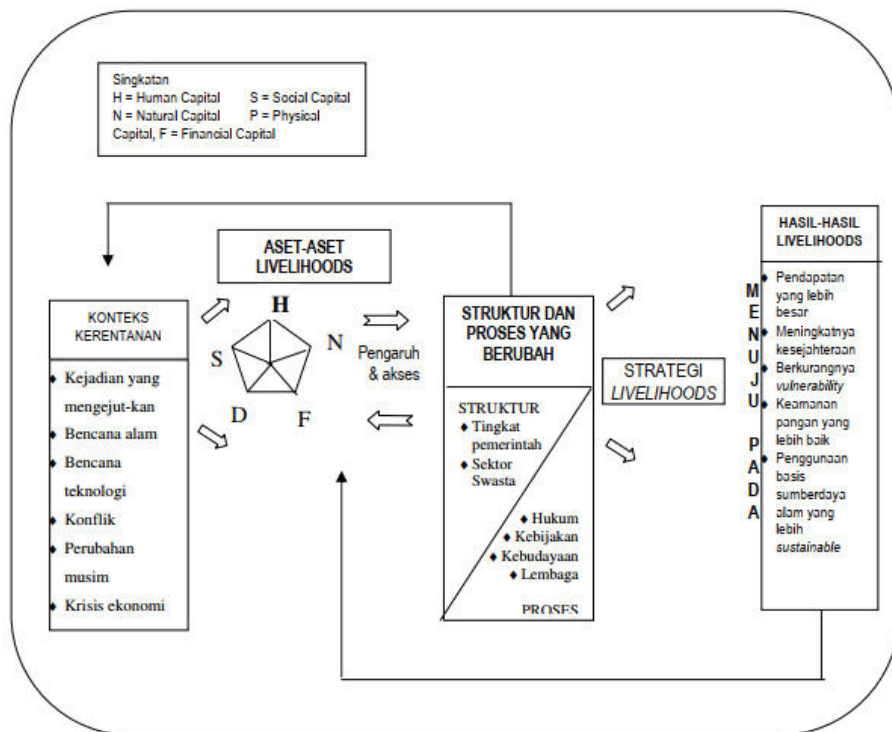
Melakukan pengelolaan wisata dengan baik dan melibatkan masyarakat sebagai pelaku kegiatan pariwisata

Kusnadi (2012), sesuai dengan paparan diatas, memberikan kesimpulan bahwa masyarakat pesisir saat ini masih masuk dalam kategori miskin. Walaupun berdasarkan beberapa definisi, masyarakat pesisir seperti nelayan pemilik modal masih memiliki kesejahteraan yang lebih baik. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat pesisir didominasi oleh masyarakat yang tidak memiliki modal untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam pada bidang kelautan maupun perikanan. Pada umumnya

kawasan pesisir didominasi oleh nelayan yang menggunakan peralatan tangkap sederhana, buruh dari nelayan pemilik modal, buruh pabrik atau pembudidaya ikan tradisional.

Penanggulangan masalah kemiskinan harus dipilih strategi yang dapat memperkuat peran dan posisi perekonomian rakyat dalam perekonomian nasional, sehingga terjadi perubahan struktural yang meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, pemberdayaan sumber daya manusia (Sumodiningrat, 1999). Pemberdayaan sebagai strategi pengentasan kemiskinan harus menjadi proses multidimensi dan multisegi yang memobilisasi sumberdaya dan kapasitas masyarakat (Mc Whirter, E.H., 1991; Friedman John, 1992). Salah satu pendekatan pemberdayaan masyarakat yang cukup inovatif adalah *the Sustainable Livelihood Approach (SLA)*, yang pada dasarnya upaya pelibatan (partisipasi) masyarakat untuk belajar dan beraktivitas secara berkelanjutan dengan cara unik mereka menjalani hidup dalam rangka meningkatkan kualitas hidup mereka. Menurut Oliver Serrat (2008), "*the sustainable livelihood approach (SLA) is the process by which rural families construct a diverse portfolio of activities and social support capabilities in their struggle for survival and in order to improve their standards of livings*". Hal ini didukung oleh Shadi Hamadeh (2009), yang menyatakan bahwa "*The sustainable livelihoods approach is a way of thinking about the objectives, scope, and priorities for development activities*".

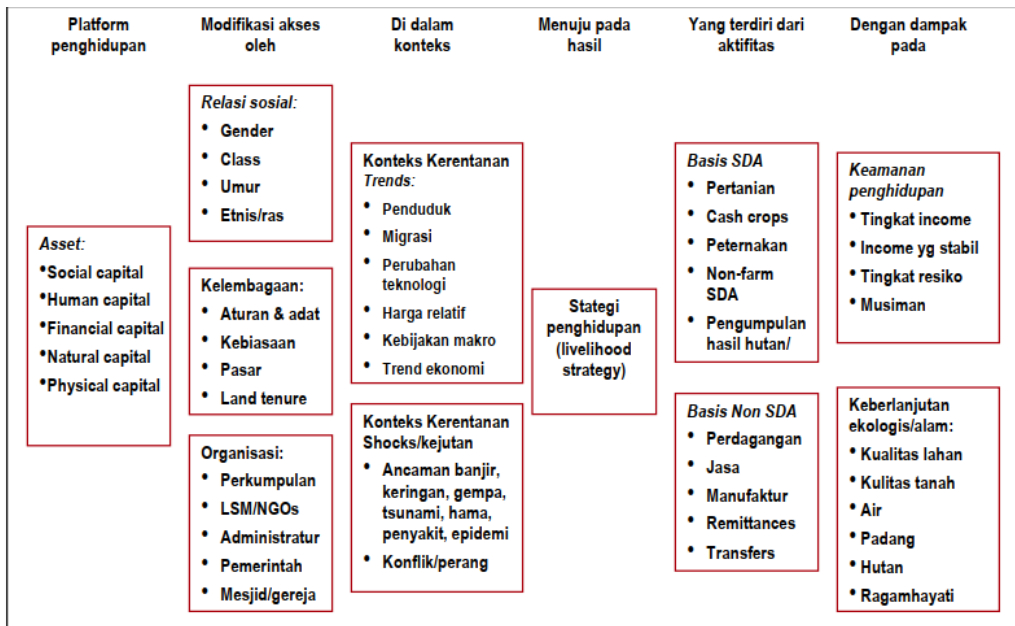
Sustainable Livelihoods (SL) ada sebagai konsep yang memberikan makna pendobrak terhadap kondisi pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan yang terjadi hingga saat ini, maupun pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan yang sekarang sedang dilakukan. Kerangka kerja SL tergambar pada gambar berikut :



Gambar 1. Kerangka Sustainable Livelihood (di Terjemahkan dari DFID 1999, Sustainable Livelihoods Guidance Sheets.)

Kerangka *sustainable livelihood* ini merupakan penyempurnaan dari bentuk dua dimensi yang disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan masyarakat yang ada saat ini. Hal ini dikarenakan secara realita keterkaitan dan interaksi antara komponen *sustainable livelihood* lebih kompleks. Kerangka kerja *sustainable livelihood* menunjukkan gambaran riil mengenai kehidupan dalam kelompok atau komunitas. Kerangka diawali dari banyaknya keluarga nelayan yang bermata pencaharian utama menangkap ikan dan kemampuan untuk menyediakan kebutuhan pokok rendah. Untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, keluarga nelayan pada umumnya mencukupi kebutuhan pokok hidupnya dengan memiliki beberapa sumber penghidupan dan sumber penghasilan (*income*). Sehingga hasil laut tidak menjadi satu-satunya sumber yang digunakan untuk menopang tingkat kesejahteraan nelayan (DFID, 2001).

Alur dari kerangka kerja ini adalah untuk menunjukkan jalan berpikir mengenai kehidupan masyarakat yang masuk dalam kategori miskin. Pada kerangka kerja ini masyarakat dianggap berada pada kondisi rentan seperti sering terjadi bencana, konflik atau krisis. Sehingga sesuai dengan kondisi tersebut, masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan memanfaatkan keragaman sumber daya alam dan lingkungan, kondisi sosial dan finansial kapital dan sumber daya manusia serta sumber daya infrastruktur fisik. Sistem keberlanjutan pada masyarakat yang masuk dalam kategori miskin pada umumnya mencari alternatif kegiatan yang merupakan bentuk lain (bertransformasi) dari aset atau sumber daya atau modal yang dimiliki.



Gambar 2. Kerangka Analisis Penghidupan (Frank Ellis dalam Saragih, 2007)

Kerangka analisis penghidupan oleh Frank Ellis ini merupakan revisi dari model yang dilakukan oleh DFID 1999 (Gambar 1.). Frank Ellis (2000) memberikan modifikasi yang agar peran akses lebih jelas. Gambar 2. Menunjukkan kerangka yang memberikan gambaran pada suatu kelompok dalam melakukan kegiatan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan pokok, bergantung pada aset yang dimiliki baik materi ataupun dari manfaat aset

tersebut. Aset yang dimiliki dapat berupa modal sosial, sumber daya manusia, finansial ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan atau infrastruktur. Namun, pada kondisi dilapangan pada umumnya modal tersebut sering didominasi oleh relasi yang berada pada tingkat sosial tertentu, seperti gender, kelas ekonomi, umur, etnisitas, agama atau organisasi tertentu.

4.2 Kemiskinan di Kawasan Pesisir Perkotaan berdasarkan *Sustainable Livelihood Approach (SLA)*

Beberapa permasalahan masyarakat yang berada di kawasan pesisir menyebabkan kemiskinan. Hal ini pada umumnya dikarenakan para nelayan masih bergantung pada sumber daya alam di laut dan pesisir dalam memenuhi kebutuhan sehingga mereka pada umumnya memerlukan biaya investasi besar dan bergantung pada musim. Nelayan didominasi oleh kelas pekerja, misalnya sebagai nelayan kecil, buruh nelayan, pengolah ikan skala kecil dan pedagang kecil karena memiliki kemampuan investasi terbatas. Nelayan kecil hanya mampu memanfaatkan sumberdaya di daerah pesisir dengan hasil tangkapan yang cenderung terus menurun akibat persaingan dengan kapal besar dan penurunan mutu sumberdaya pantai. Selain itu, hasil tangkapan juga mudah rusak sehingga melemahkan posisi tawar mereka dalam transaksi penjualan. Pola hubungan yang eksploitatif antara pemilik modal dengan buruh dan nelayan sebagai pekerja, serta usaha nelayan yang bersifat musiman dan tidak menentu menyebabkan masyarakat miskin di kawasan pesisir cenderung sulit untuk keluar dari kemiskinan serta dari lilitan hutang pedagang atau pemilik kapal (Febrianto, 2005).

Satria (2001) berpendapat bahwa secara sosio-kultural, masyarakat yang berada di kawasan pesisir awalnya dibangun atas paduan antara budaya maritim laut, pantai dan berorientasi pasar. Namun, tradisi ini berkembang menjadi budaya dan sikap hidup yang kosmopolitan, inklusivistik, egaliter, *outward looking*, dinamis, *enterpreneurship* dan pluralistik. Beberapa potensi

konflik dalam masyarakat pesisir juga sering terbentur dengan pola kepemilikan dan penguasaan sumberdaya alam. Sifat dari pola kepemilikan dan penguasaan sumberdaya alam wilayah pesisir dapat dibagi menjadi 4 (empat), yaitu: (1) tanpa pemilik (*open access property*); (2) milik masyarakat atau komunal (*common property*); (3) milik pemerintah (*public state property*); (4) milik pribadi (*private property*).

Terdapat beberapa perbedaan mendasar antara masyarakat pesisir dan masyarakat agraris, terutama pada faktor akses terhadap sumber daya. Laut merupakan sumberdaya alam yang bersifat *open access* sehingga siapapun dapat mengaksesnya, hal ini berbeda dengan sumber daya lahan pada masyarakat agraris. Sumberdaya yang bersifat terbuka ini menyebabkan persaingan antar nelayan menjadi semakin keras. Sehingga, tidak mengherankan jika nelayan atau penduduk pesisir pada umumnya memiliki karakter yang keras. Hal ini juga dipengaruhi oleh tingginya resiko secara keselamatan maupun ekonomi (Satria, 2001).

Mubyarto (1984) dan Satria (2001) membagi nelayan menjadi 2 kategori, yaitu nelayan kecil dan nelayan besar. Nelayan kecil memiliki ciri-ciri seperti penggunaan teknologi yang rendah dan jenis armada yang digunakan. Pada umumnya nelayan kecil masih berorientasi pada kondisi dimana pekerjaan cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarga. Sedangkan, ciri dari nelayan besar adalah penggunaan teknologi modern pada alat tangkap dan armada yang digunakan. Nelayan besar sudah berada dalam posisi untuk mencari keuntungan, tidak hanya memenuhi kebutuhan. Ciri lainnya pada nelayan besar adalah pada umumnya menggunakan tenaga kerja seperti buruh upah dalam jumlah tertentu, sedangkan nelayan kecil memanfaatkan keluarga sebagai tenaga kerja

Beberapa penjelasan diatas telah banyak menunjukkan bahwa adanya tekanan pada kondisi kemiskinan dialami oleh nelayan tradisional dengan faktor penyebab yang kompleks (Satria, 2001; Suyanto, 2003). Kusnadi (2002) menyatakan bahwa faktor yang kompleks berkaitan dengan kondisi

ikan yang sesuai musim, sumber daya manusia yang terbatas, modal dan aksesibilitasnya serta sistem perdagangan ikan yang terlalu eksploitatif terhadap nelayan yang berada pada posisi produsen. Selain itu ada juga faktor eksplorasi berlebihan terhadap sumber daya alam di laut dan pesisir sehingga memunculkan dampak negatif dari modernisasi sektor perikanan dan kelautan (revolusi biru). Proses ini masih berlangsung hingga saat ini, sehingga dampak ini dirasakan langsung oleh nelayan. Dampak tersebut adalah penurunan tingkat pendapatan akibat sulit memperoleh hasil tangkapan. Beberapa studi penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan hidup nelayan di wilayah manapun memiliki kondisi yang seragam, dimana kemiskinan dan kesenjangan sosial yang didasarkan oleh timpangnya pendapatan yang dihasilkan menjadi persoalan yang penting dan belum memiliki solusi.

Kondisi perikanan laut sebagai perikanan yang *open access* dan milik bersama menyebabkan adanya persaingan dalam penangkapan ikan. Karakteristik ini berakibat pada penggunaan berlebihan pada sumber daya dan juga pemborosan secara ekonomi. Pemborosan secara ekonomi dikarenakan terjadinya penurunan jumlah keuntungan serta penurunan jumlah produksi pada masyarakat nelayan. Selain itu, pemborosan sumber daya dengan melakukan eksploitasi yang memicu timbulnya konflik perebutan daerah penangkapan. Hal ini juga akan berdampak pada rendahnya pendapatan rata-rata masyarakat nelayan kecil akibat adanya kesenjangan teknologi sehingga penguasaan modal dan teknologi juga rendah (Christy, 1982).

Menurut Frank Ellis (2000), konsep *livelihood* sangat penting dalam memahami lingkup strategis. Hal ini dikarenakan konsep mata pencaharian merupakan bagian dari strategi. Mata pencaharian dapat berupa pendapatan tunai atau barang, lembaga sosial, relasi atau hak kepemilikan yang diperlukan dalam memenuhi dan menjamin kebutuhan hidup masyarakat.

4.3 Pengaruh Perubahan Iklim terhadap Kerentanan dan Adaptasi Nelayan Berdasarkan Perspektif SLA

Pada dasarnya perubahan iklim adalah masalah global, bukan masalah negara-negara tertentu saja. Oleh karenanya penanggulangannya pun harus melibatkan semua negara. Kebijakan penanggulangan dampak perubahan iklim yang disusun dan diimplementasikan juga bersifat global. Lebih rinci kebijakan ini diturunkan ke tingkat negara yang mengatur peran pemangku kepentingan di setiap bidang. Adalah *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)* yang disusun pada bulan Juni 1992 merupakan aksi global pertama. Sasaran dari kesepakatan yang disusun pada *Earth Summit* di Rio De Janeiro ini adalah "*stabilize greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system*".

Pada tataran nasional serangkaian kebijakan dan regulasi terkait perubahan iklim antara lain dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim menunjukkan kesungguhan Pemerintah RI dalam merespon UNFCCC pada dua tahun sebelumnya.

Pemerintah Republik Indonesia juga mengeluarkan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API). Dimana maksud dari penyusunan RAN-API ini adalah menghasilkan sebuah rencana aksi nasional untuk beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim yang terkoordinasi secara terpadu dengan semua pemangku kepentingan yang terlibat, baik dari pemerintah, organisasi kemasyarakatan, masyarakat, swasta, dan lain lain. Adaptasi perubahan iklim ini bertujuan untuk terselenggaranya sistem pembangunan yang berkelanjutan dan memiliki ketahanan (resiliensi) tinggi terhadap dampak perubahan iklim. Rincian untuk mencapai tujuan utama tersebut adalah dengan membangun ketahanan ekonomi, ketahanan tatanan kehidupan, baik secara fisik,

maupun ekonomi dan sosial dan menjaga ketahanan ekosistem serta ketahanan wilayah khusus seperti pulau-pulau kecil untuk mendukung sistem kehidupan masyarakat yang tahan terhadap dampak perubahan iklim. Sehingga dapat disimpulkan pengertian adaptasi perubahan iklim sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan (resiliensi) suatu sistem terhadap dampak perubahan iklim. Bentuk adaptasi perubahan iklim di Indonesia diarahkan sebagai:

1. Upaya penyesuaian dalam bentuk strategi, kebijakan, pengelolaan/manajemen, teknologi dan sikap agar dampak (negatif) perubahan iklim dapat dikurangi seminimal mungkin, dan bahkan jika memungkinkan dapat memanfaatkan dan memaksimalkan dampak positifnya.
2. Upaya mengurangi dampak (akibat) yang disebabkan oleh perubahan iklim, baik langsung maupun tidak langsung, baik kontinu maupun diskontinu dan permanen serta dampak menurut tingkatnya. Dengan memperhatikan sektor-sektor dan aspek pembangunan yang terkena dampak perubahan iklim dapat dikatakan bahwa untuk memastikan pencapaian sasaran pembangunan nasional dengan adanya dampak perubahan iklim diperlukan ketahanan di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Selain itu, mengingat bahwa negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang rentan terhadap perubahan iklim diperlukan pula ketahanan di wilayah khusus seperti pulau-pulau kecil, pesisir dan perkotaan.

Untuk itu, dalam kaitan ini, Sasaran Strategis RAN-API diarahkan untuk:

1. Membangun ketahanan ekonomi,
2. Membangun tatanan kehidupan (sosial) yang tangguh terhadap dampak perubahan iklim (ketahanan sistem kehidupan),

3. Menjaga keberlanjutan layanan jasa lingkungan ekosistem (ketahanan ekosistem) dan
4. Penguatan ketahanan wilayah khusus di perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil. Untuk mendukung penguatan-penguatan di berbagai bidang tersebut, dibutuhkan sistem pendukung penguatan ketahanan nasional menuju sistem pembangunan yang berkelanjutan dan tangguh terhadap perubahan iklim.

Bidang perikanan memiliki ketergantungan terhadap faktor musim, harga serta kondisi pasar. Hal ini berakibat pada tingginya tingkat kerentanan dalam perubahan fisik dan iklim. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, banyak nelayan memperkecil resiko kegagalan daripada mencari peluang untuk memaksimalkan hasil yang didapat. Hal ini dikarenakan anggapan bahwa adanya kegagalan usaha akan mengancam eksistensi mereka pada sektor perikanan (Abeje, 2019).

Susan (2003) mengkategorikan kapasitas adaptif pada masyarakat pesisir dalam menghadapi perubahan iklim menjadi 3 model, yaitu :

1. Kajian kerentanan sosial yang berfokus pada identifikasi kondisi kerentanan setiap orang dan tempat karena adanya kejadian alam yang ekstrim

Model ini didasarkan pada dampak perubahan iklim dan perubahan sosial ekonomi, resiko yang akan dihadapi atau potensi terjadinya bencana yang berakibat fatal. Pada bidang perikanan, hilangnya ikan atau bertambahnya biaya untuk melaut merupakan beberapa contoh terjadinya bencana. Dampak perubahan iklim merujuk pada dampak pada seorang nelayan, rumah tangga atau kelompok sosial. Seth Tuler (2008) menyatakan bahwa kerentanan adalah “*a function of exposure to risk or as measure of coping capabilities*”.

Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mendapatkan indikator kerentanan sosial adalah mengukur penerimaan pada bencana yang sedang dihadapi beserta tekanan yang terjadi pada seorang atau

sekelompok masyarakat. Tingkat kerentanan tersebut akan dipengaruhi oleh akses sumber daya alam dan banyaknya jenis sumber pendapatan. Dalam jangka pendek atau jangka panjang, kerentanan dapat berubah sesuai dengan adaptasi yang dapat dilakukan oleh seorang atau sekelompok masyarakat tersebut. Bentuk adaptasi yang dimaksud adalah karakter ancaman bencana, dampak dari bencana, sensitivitas dan usaha pemulihan yang dilakukan untuk mendapatkan hasil dengan cepat

2. Kajian kerentanan pada kondisi sosial yang didasarkan pada ukuran resistensi dan ketahanan sosial pada suatu bencana

Pada model kedua ini dikaitkan dengan kondisi ketahanan masyarakat pesisir (*resilensi/resilience*) yang dipicu oleh perubahan iklim. Kondisi ketahanan yang dimaksud adalah adaptasi masyarakat untuk mempertahankan kondisi dalam rangka menghadapi perubahan iklim. Sehingga pengembangan adaptasi masyarakat diperlukan dalam mengembalikan fungsi ketahanan masyarakat. Strategi dalam meningkatkan ketahanan masyarakat memiliki tujuan untuk mengembalikan kondisi ke keadaan semula dengan melakukan cara-cara adaptasi, seperti adaptasi berbasis masyarakat melalui fungsi jaringan/*networking*, melakukan pendekatan budaya atau kearifan lokal ataupun melalui kebijakan pemerintah.

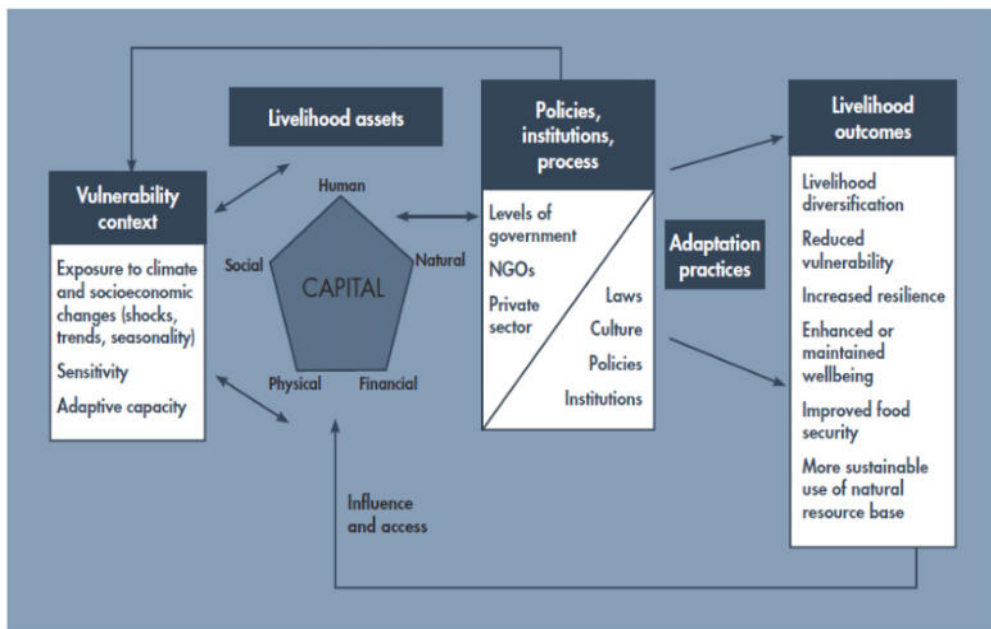
3. Kajian yang menunjukkan adanya interaksi antara kesempatan yang potensial dan ketahanan sosial pada suatu wilayah

Pada model ketiga merupakan penjelasan antara dampak yang potensial dan ketahanan sosial pada suatu wilayah, dengan faktor yang diperhatikan adalah sensitivitas. Sensitivitas yang dimaksud adalah titik atau derajat dimana seorang atau sekelompok masyarakat mengalami kerugian saat tertimpa bencana. Sehingga, sensitivitas dikaitkan dengan seberapa sering seorang atau

sekelompok masyarakat menghadapi suatu jenis bencana. Selain itu sensitivitas ini juga akan dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat yang ada pada wilayah tersebut. Pada hubungannya dengan ketahanan sosial, ada upaya untuk peningkatan kerentanan. Namun upaya peningkatan ini sering kali mengakibatkan rendahnya sensitivitas masyarakat terhadap bencana yang menyebabkan resiko kerugian.

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian diatas, bahwa konsep kerentanan dapat dilihat dari dampak iklim dan perubahan sosial ekonomi, sensitivitas dan kapasitas adaptasi. Tingkat kerentanan ini juga dapat dikaitkan dengan aset yang dimiliki.

Berdasarkan 3 konsep kerentanan, terdapat mata pencaharian yang memiliki kerentanan paling tinggi terhadap terjadinya perubahan iklim. Tingkat kerentanan pada seorang atau sekelompok masyarakat tersebut akan dipengaruhi oleh kebijakan, kelembagaan dan proses intervensi langsung yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Kebijakan dan intervensi program akan memberikan kemudahan masyarakat dalam mengatasi kerentanan dan kemiskinan. Sehingga akan menumbuhkan modal sosial, kapital, sumber daya serta sumber daya manusia. Hal ini akan berpengaruh pada masyarakat agar memiliki kapasitas adaptasi yang meningkat terutama untuk menghadapi bencana atau ancaman akibat perubahan iklim. Tumbuhnya berbagai modal sosial, kapital dan sebagainya akan mendorong masyarakat bertindak mengatasi kerentanan yang tergambar dari adanya penganeekaragaman mata pencaharian, aksi peningkatan ketahanan pangan, dan sebagainya.



Gambar 3. Konsep Pendekatan Sustainable Livelihoods dalam Perubahan Iklim

Sumber : [Mirjam Macchi, Amanda Manandhar Gurung, Brigitte Hoermann, Dhrupad Choudhury. 2011. Climate Variability And Change In The Himalayas Community Perceptions And Responses. Nepal : International Centre for Integrated Mountain Development]. Hal. 1]

Kapasitas adaptif pada seorang masyarakat akan didasarkan pada aksesibilitas sumber daya yang dapat dilakukan. Kemampuan masyarakat untuk meningkatkan jumlah akses menuju sumber daya akan membantu meningkatkan kapasitas adaptif terhadap perubahan iklim. Masyarakat nelayan yang ada di Kota Surabaya menunjukkan pola yang sama sebagai penduduk pesisir perkotaan yang mensiasati dampak perubahan iklim dengan menekuni pekerjaan lain untuk sementara di musim paceklik.

Kejadian perubahan iklim akan menjadi dampak yang baik atau buruk tergantung pada kondisi kerentanan masyarakat. Dampak perubahan iklim pada sistem mata pencaharian masyarakat pesisir masih dirasakan sebagai penggantian orientasi jenis pekerjaan untuk menghindari gangguan musim. Dampak ini berpengaruh pada kerugian modal produksi akibat gagal panen atau tidak ada hasil dalam beberapa kali penangkapan ikan, sehingga berdampak pada tidak adanya modal kerja.

Kelompok masyarakat yang masuk dalam kategori miskin berada dalam kondisi yang semakin buruk apabila terjadi bencana alam, misalnya gagal panen atau cuaca buruk sehingga tidak dapat melaut (Su, 2019). Terjadinya kerugian secara terus-menerus mengakibatkan pekerjaan tidak dapat dilakukan secara rutin karena modal kerja sudah tidak ada. Pada sistem yang dilakukan secara perorangan, kerugian yang terjadi akan mengakibatkan perubahan orientasi pekerjaan. Sedangkan pada sistem kolektif, kerugian perorangan akan mendapatkan bantuan dengan sistem patron-klien, dimana kerugian akibat perubahan iklim akan ditanggung bersama atau ditanggung patron.

Peralihan menuju jenis mata pencaharian lain pada umumnya mengakibatkan kondisi yang lebih buruk serta munculnya hutang akibat tidak dapat mengembalikan pinjaman untuk modal kerja. Hal tersebut merupakan salah satu terjadinya kerentanan perseorangan (Su, 2019). Kerentanan sosial biasanya dikarenakan adanya faktor sosial budaya, misalnya penguasaan lahan, sistem relasi, sistem bagi hasil, sistem jaminan sosial secara tradisional maupun distribusi resiko dari kerugian akibat kegagalan hasil panen.

Langkah yang dapat dijadikan sebagai prioritas dalam menghadapi dampak perubahan iklim, antara lain :

1. Melakukan sosialisasi mengenali gejala perubahan iklim dan dampak yang dapat terjadi di masyarakat. Peningkatan kesadaran ini diperlukan agar seluruh komponen masyarakat dapat bersiap menghadapi dampak jangka panjang kerugian sosial maupun ekonomi.
2. Mengupayakan peningkatan akses informasi mengenai arus air laut dan cuaca dari Kementrian Kelautan dan Perikanan atau BMKG. Akses ini menjadi penting karena informasi arus dan cuaca berdampak langsung terhadap mata pencaharian masyarakat nelayan.



Pemberdayaan Nelayan di Pesisir Perkotaan Melalui *Sustainable Livelihood*

5.1 Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan memiliki banyak pengertian dari beberapa ahli, diantaranya menurut Kartasasmitha (1996), memberikan pengertian bahwa pemberdayaan merupakan upaya pengembangan kemampuan masyarakat dengan cara memberikan dorongan, motivasi dan meningkatkan kesadaran mengenai potensi yang dimiliki serta berusaha untuk memanfaatkan potensi dengan tindakan nyata. Menurut Payne dalam Adi (2008), suatu pemberdayaan (*empowerment*), pada intinya ditujukan *“to help clients gain power of decision and action over their own lives by reducing the effect of social or personal blocks to exercising existing power, by increasing capacity and self-confidence to use power and by transferring power from environment to clients.”* yaitu untuk membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan, hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungan.

Proses pemberdayaan menurut Suharto (2009) memerlukan tujuan dalam usaha pemberdayaan. Usaha tersebut dilakukan dengan menerapkan pemberdayaan sebagai upaya pendekatan dengan melakukan penguatan, perlindungan, penyokong dan pemeliharaan.

1. Pemungkinan, dilakukan dengan menciptakan suatu iklim yang meningkatkan kemungkinan potensi masyarakat berkembang dengan maksimal. Usaha yang dapat dilakukan adalah membentuk kegiatan

pemberdayaan yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya dan ketrampilan.

2. Penguatan, dilakukan dengan mengembangkan kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat sehingga menciptakan masyarakat yang mandiri. Program pemberdayaan dilakukan dengan tujuan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber daya.
3. Perlindungan, dilakukan dengan memberikan perlindungan terhadap kelompok masyarakat lemah. Membantu masyarakat untuk menghindari ketidakseimbangan persaingan dan membantu mencegah eksploitasi kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah
4. Penyokongan, dilakukan dengan memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat memiliki kemampuan dalam melakukan peran dan tugas masing-masing
5. Pemeliharaan, dilakukan dengan pemeliharaan kondisi agar kondusif sehingga distribusi kekuasaan berjalan seimbang antar kelompok masyarakat

Pemberdayaan merupakan bentuk dari suatu proses, sehingga harus dilakukan secara bertahap. Tahapan pemberdayaan yang harus dilalui menurut Sulistyani dalam Muslim (2012) adalah :

Pertama, tahap penyadatan dan pembentukan perilaku. Tahapan ini memerlukan pembentukan kesadaran dan kepedulian dari nelayan sehingga dapat memunculkan kebutuhan akan peningkatan kapasitas diri. Nelayan sebagai sasaran pemberdayaan harus disadarkan mengenai perlu adanya perubahan untuk merubah keadaan agar kesejahteraan meningkat. Sentuhan melalui proses penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran akan tentang kondisi nelayan saat itu, sehingga dapat merangsang kesadaran akan perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang

lebih baik. Sehingga dengan adanya penyadaran ini dapat mengunggah pihak yang menjadi sasaran pemberdayaan dalam merubah perilaku nelayan.

Kedua, tahap transformasi pengetahuan dan kecakapan ketrampilan. Perlu adanya pembelajaran mengenai pengetahuan dan kecakapan ketrampilan untuk mendukung kegiatan pemberdayaan nelayan. Dengan adanya pengetahuan, dan kecakapan ketrampilan maka sasaran dari pemberdayaan akan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan yang menjadi nilai tambah dari potensi yang sudah dimiliki. Sehingga pada nantinya pemberdayaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Ketiga, tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan ketrampilan. Tahapan peningkatan kemampuan intelektual dan ketrampilan ini lebih diarahkan untuk lebih mengembangkan kemampuan yang dimiliki, meningkatkan kemampuan dan kecakapan ketrampilan yang pada nantinya akan mengarahkan pada kemandirian.

Menurut Adi (2008), tahapan pemberdayaan terdiri dari 7 (tujuh) tahapan, yaitu:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini dipersiapkan petugas dan persiapan kondisi di lapangan. Persiapan petugas diperuntukkan agar ada kesamaan persepsi mengenai pendekatan yang digunakan antar anggota dalam tim fasilitator. Persiapan lapangan dimaksudkan untuk dilakukan studi kelayakan pada kawasan yang akan dijadikan sasaran pemberdayaan.

2. Tahap *assesment*

Pada tahap ini dilakukan identifikasi masalah dan pemetaan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat sasaran

3. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan

Pada tahapan ini tim fasilitator mengajak masyarakat untuk terlibat berpikir mengenai masalah yang sedang dialami dan solusinya.

Upaya dalam mengatasi permasalahan dilakukan dengan memberikan alternatif program dan kegiatan yang akan dilakukan

4. Tahap formulasi rencana aksi

Tahapan ini fasilitator memberikan bantuan masyarakat untuk menyusun ide dan pendapat dalam bentuk tulisan, misalnya bentuk proposal yang akan diberikan kepada penyandang dana

5. Tahap pelaksanaan

Tahapan ini merupakan penerapan dari rumusan program atau kegiatan yang telah dirumuskan. Upaya pelaksanaan program pemberdayaan bergantung pada peran fasilitator dan masyarakat. Sehingga kerjasama yang baik diperlukan antara fasilitator dan masyarakat untuk mengatasi masalah yang terjadi saat pelaksanaan

6. Tahap evaluasi

Tahapan ini merupakan bentuk pengawasan dari masyarakat dan fasilitator pada program pemberdayaan. Evaluasi dilakukan dengan keterlibatan masyarakat dan fasilitator

7. Tahap terminasi

Tahapan ini merupakan tahap keputusan secara formal pada masyarakat sasaran pemberdayaan. Terminasi dilakukan apabila masyarakat telah mandiri atau hingga penyandang dana berhenti memberikan bantuan

Berdasarkan Sumodiningrat (2003), terdapat 3 tahapan dalam upaya pemberdayaan masyarakat, antara lain *“menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat itu berkembang, dimana titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan. Kemudian memperkuat potensi dan daya yang dimiliki oleh masyarakat, ini memerlukan langkah-langkah positif dan nyata. Upaya yang terakhir adalah pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi semakin berdaya dan memanfaatkan peluang”*.

Suatu kegiatan pemberdayaan tentunya memiliki beberapa indikator penentu pencapaian dalam pemberdayaan tersebut. Hasil pemberdayaan menurut Suharto (2009) adalah pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang khususnya kelompok rentan, dan kelompok lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan untuk :

1. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.
2. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
3. Partisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

5.2 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Sekalipun negara atau pemerintah telah mengimplementasikan sejumlah kebijakan untuk membangun sektor perikanan tangkap dan pemberdayaan ekonomi produktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan, namun hasil yang dicapai masih belum maksimal. Selama ini kebijakan nasional dalam pembangunan perikanan sejak awal 1970-an dan masih terus di berlakukan hingga saat ini yang mengutamakan peningkatan produksi, mengakibatkan kelangkaan sumberdaya perikanan, kerusakan ekosistem pesisir laut, kemiskinan, dan kesenjangan sosial. Kebijakan demikian tidak disertai atau di kawal dengan kebijakan pembanding tentang bagaimana masyarakat nelayan harus menjaga keberlanjutan sumberdaya kelautan. Sebenarnya, kebijakan ini memberi keuntungan ekonomi bagi para nelayan bermodal besar yang secara kuantitatif berjumlah sedikit, namun pada akhirnya semua nelayan dari berbagai kategori usaha menghadapi persoalan yang sama (Widodo, 2011).

Demikian juga kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan yang selama ini diterapkan. Kebijakan tersebut ibarat hanya memberi ikan kepada nelayan, tetapi tidak memberikan jaminan keberlanjutan bagaimana seandainya alat pemancing itu rusak. Hal ini dapat ditunjukkan dengan lemahnya dukungan kebijakan lembaga-lembaga perbankan resmi untuk penyaluran kredit dengan bunga rendah kepada masyarakat nelayan secara berkesinambungan dan konsisten. Pada dasarnya, dukungan ini sangat dibutuhkan nelayan untuk menjaga kelanjutan usaha perikanannya (Wastuti, 2014).

Gejala fluktuatif diatas mencerminkan belum adanya payung kebijakan pemberdayaan yang bersifat nasional dan menjadi referensi para penentu keputusan setingkat menteri sehingga hal demikian memberikan rasa aman bagi lembaga perbankan untuk bekerja sama dengan nelayan dalam transaksi bantuan kredit.

Disamping itu, tidak adanya pihak-pihak yang membantu secara total dan bersungguh-sungguh dalam membangun masyarakat nelayan, mendorong masyarakat nelayan mengembangkan strategi kemandirian berdasarkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Kemandirian ini membangkitkan sikap-sikap otonom di kalangan nelayan merupakan modal sosial yang sangat berharga sebagai basis kelangsungan hidup mereka. Manifestasi dari sikap-sikap otonom nelayan terwujud dalam konstruksi pranata sosial, seperti perkumpulan simpan pinjam, arisan, dan jaringan sosial berfungsi untuk menggalang kemampuan sumberdaya ekonomi kolektif dalam relasi timbal balik sehingga eksistensi masyarakat nelayan tetap terjamin (Widodo, 2011).

Jaringan patron-klien merupakan wadah dan sarana yang menyediakan sumber daya jaminan sosial secara tradisional untuk menjaga kelangsungan hidup nelayan. Kekuatan hubungan patron-klien ini dapat dilihat pada pola-pola relasi sosial antara :

1. Nelayan pemilik dengan nelayan buruh

2. Nelayan pemilik dengan penyedia modal usaha, (pedagang ikan/pedagang perantara,
3. Nelayan (nelayan pemilik dan nelayan buruh) dengan pemilik toko yang menyediakan kebutuhan hidup dan kebutuhan melaut. Jika hasil tangkapan nelayan diberikan dalam bentuk ikan, biasanya hubungan patron-klien antara nelayan buruh dan pedagang ikan juga intensif.

Menurut Widodo (2011), pemberdayaan yang dilakukan pada masyarakat pesisir sebaiknya didasarkan pada analisa sosial ekonomi masyarakat di lokasi studi secara spesifik, sehingga program dapat dicapai sesuai tujuan dan tepat sasaran. Hal ini dikarenakan apabila analisa tidak dilakukan secara spesifik maka program pemberdayaan tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan. Kondisi sosial ekonomi dijadikan sebagai parameter untuk menentukan target dan tujuan, sehingga dapat dibentuk visi dan misi program pemberdayaan masyarakat pesisir. Program yang dilakukan harus memiliki ciri khas yang akan membantu menentukan metode pendekatan dan strategi yang sesuai dalam pemberdayaan masyarakat pesisir.

5.3 Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Melalui *Sustainable Livelihood Approach (SLA)*

Menurut Saragih (2007), keberlanjutan memiliki banyak sisi penting yang kompleks sebagai bentuk pendekatan, sehingga penghidupan seseorang atau sekelompok orang dapat dikatakan berkelanjutan apabila :

1. Memiliki fleksibilitas dalam menghadapi kejadian tidak terduga serta berbagai tekanan dari faktor eksternal
2. Tidak memiliki ketergantungan pada bantuan atau dukungan dari pihak luar
3. Menjaga produktivitas sumber daya alam untuk jangka panjang
4. Saling menjaga penghidupan dengan tidak mengganggu penghidupan milik orang lain

Cara lain untuk mengatur konsep pada dimensi keberlanjutan adalah memberikan perbedaan pada faktor lingkungan, ekonomi, sosial dan institusional pada sistem yang berkelanjutan (Su, 2018). *Sustainable livelihood approach* (SLA) ini bersifat fleksibel dalam penerapannya, tetapi prinsip-prinsip inti harus tetap diterapkan. Berdasarkan Saragih (2007), prinsip-prinsip tersebut antara lain :

1. *People centered*

Sustainable livelihood approach memanfaatkan masyarakat sebagai pusat pembangunan. Dimana perhatian dipusatkan pada masyarakat untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan, revolusi ekonomi serta pembangunan yang berkelanjutan

2. Holistik

Sustainable livelihood approach membantu melakukan identifikasi hambatan dan tantangan paling besar serta identifikasi peluang dan kesempatan yang memungkinkan bagi masyarakat dari berbagai kategori. Pendekatan keberlanjutan ini disusun berdasarkan definisi dan kesadaran masyarakat sendiri mengenai hambatan dan tantangan atau peluang dan kesempatan yang terjadi pada wilayah tersebut

3. Dinamis

Pihak yang berkepentingan seperti masyarakat dan kelembagaan serta struktur yang menghubungkan pihak tersebut dibuat secara dinamis. Pendekatan ini berusaha memahami dan belajar dari perubahan sehingga bisa mendukung pola-pola perubahan yang positif dan membantu menghilangkan pola-pola yang negatif. Berdasarkan pengalaman di lapangan, secara dinamis akan mudah terlihat dampak *sustainable livelihood approach* yang muncul dari kejadian tak terduga yang berasal dari luar komunitas masyarakat dan pengaruh perubahan-perubahan. Usaha dalam menyusun *sustainable livelihood approach* dengan prinsip dinamis akan memperluas lingkup analisis keberlanjutan.

4. Membangun kekuatan dan kapasitas lokal

Pada prinsip ini poin penting yang dilakukan pendekatan adalah analisis kekuatan dan kapasitas lokal. Pendekatan ini akan membantu memfokuskan pendekatan pada masyarakat yang masih belum memiliki kesejahteraan yang cukup. Pendekatan ini akan mengidentifikasi potensi tanpa ada pertimbangan latar belakang jaringan sosial, akses terhadap sumber daya, akses prasarana ataupun pengaruh kelembagaan atau faktor lain. Pendekatan ini menitikberatkan pada keberlanjutan yang bertujuan untuk menghilangkan hambatan dan ancaman dan mengoptimalkan potensi. Sehingga masyarakat akan diberikan bantuan agar lebih mandiri, berdaya dan mampu mencapai tujuan dengan kemampuan mereka sendiri.

5. Hubungan makro-mikro

Pendekatan *sustainable livelihood* berusaha menjembatani kesenjangan pembangunan yang berfokus pada tingkat makro atau mikro. Pendekatan ini berfokus pada kebijakan pemerintah di tingkat makro dalam pengaruhnya terhadap masyarakat. Pendekatan ini juga memfokuskan diri pada pengembangan dan perencanaan kebijakan yang didasarkan dari pelajaran dan pemahaman yang berasal dari struktur sosial lokal masyarakat. Pada masa mendatang, pendekatan ini akan membantu masyarakat mendapatkan peran dalam membuat kebijakan dan meningkatkan efektifitas. Hal ini dikarenakan saat ini, kebijakan makro yang disusun tidak mempertimbangkan kondisi masyarakat yang terimbas kebijakan. Pemahaman mengenai dampak yang muncul akibat penerapan kebijakan serta pemahaman masyarakat pada kebijakan sangat terbatas. Sehingga permasalahan-permasalahan ini perlu dipahami dengan baik agar mewujudkan efektifitas dan efisiensi dari pendekatan *sustainable livelihood*.

6. Keberlanjutan

Keberlanjutan dapat terjadi apabila :

- a. Penghidupan masyarakat bersifat fleksibel dalam menghadapi kejadian yang tidak terduga dan tekanan dari pihak eksternal
- b. Tidak bergantung pada bantuan yang diberikan dari pihak luar
- c. Mempertahankan produktifitas sumber daya alam dalam jangka panjang
- d. Tidak memberikan pengaruh yang buruk pada sumber-sumber penghidupan atau pilihan penghidupan milik orang lain

Keberlanjutan memiliki berbagai dimensi seperti lingkungan, ekonomi, sosial dan kelembagaan. Keberlanjutan lingkungan serta ekologis dapat dicapai apabila produktifitas sumber daya alam ditingkatkan, sehingga perlu dilestarikan agar dapat digunakan oleh generasi yang akan datang. Keberlanjutan ekonomi dapat dicapai apabila rumah tangga dapat mempertahankan tingkat pengeluaran dengan stabil (pengeluaran lebih mudah diukur daripada pemasukan). Keberlanjutan ekonomi pada masyarakat miskin dapat dicapai apabila kebutuhan dasar dapat dicapai dan mampu dipertahankan. Keberlanjutan sosial akan dicapai apabila persamaan kedudukan sosial sudah mencapai titik maksimal. Ada juga yang berpendapat bahwa keberlanjutan sosial adalah kemampuan untuk menekan ketimpangan dan peningkatan sosial kapital. Keberlanjutan kelembagaan dapat dicapai apabila struktur dan proses yang sedang dilakukan mampu dijalankan sesuai fungsi dan memberikan efek positif pada masyarakat secara jangka panjang.

Sustainable Livelihood Approach (SLA) efektif jika dilaksanakan dengan cara partisipatif. Pendekatan ini akan memicu capaian serta tujuan penghidupan masyarakat dan dilakukan oleh masyarakat sendiri. Beberapa inti dari pendekatan ini adalah :

1. Dibangun dari kekuatan masyarakat, atau yang disebut pendekatan partisipatif. Pendekatan ini digunakan untuk menentukan orang yang dapat memiliki akses pada sumber daya yang diberikan. Akses terhadap sumber daya ini dipengaruhi oleh lingkungan kelembagaan, sosial dan organisasi.
2. Pendekatan dilakukan menggunakan analisis partisipatif dengan memahami dampak dari kebijakan makro pada kehidupan masyarakat
3. Dampak dari pendekatan dilakukan dengan cara musyawarah. Musyawarah yang dimaksud selain melakukan pertemuan, juga melakukan konsesus minimum yang harus dicapai secara partisipatif mengenai pemahaman pada indikator-indikator yang digunakan.

Tabel 2. Prinsip Pendekatan *Sustainable Livelihood* dan Prakteknya

Prinsip	Praktek
Masyarakat sebagai pusat	<ul style="list-style-type: none"> • Memfokuskan perhatian pada masyarakat bukan apa yang dihasilkan oleh masyarakat • Memahami kondisi yang terjadi di masyarakat dan perbedaan-perbedaan antar jenis kegiatan • Melakukan pekerjaan bersama masyarakat dengan mencerminkan kehidupan masyarakat yang sedang dialami dengan kekuatan dan kemampuan yang mereka miliki untuk melakukan adaptasi
Kemiskinan sebagai fokus utama	<ul style="list-style-type: none"> • Mengutamakan permasalahan kemiskinan dan cara pengurangannya • Memahami kemiskinan dari sudut pandang orang miskin dan perbedaan antara tipe masyarakat miskin • Memahami kelompok yang termiskin dan bagaimana bekerja bersama kelompok tersebut • Memahami siapa yang paling miskin dan menemukan cara untuk bekerja dengan mereka
Responsif dan partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan sudut pandang orang miskin dan kebutuhannya dibandingkan pandangan organisasi maupun pengambil keputusan • Menyediakan proses bagi orang luar untuk bisa mendengar dan merespon orang miskin
Menyeluruh, dengan melibatkan seluruh pihak dan seluruh	<ul style="list-style-type: none"> • Mengedepankan kompleksitas dari kemiskinan, melibatkan banyak dimensi dan sektor (tidak hanya satu dimensi dan sektor) • Mengedepankan pentingnya jaringan (linkages) antar level (mikro-meso-makro) dan antara institusi dan sektor yang berbeda (bukan cuma peran-peran individual mereka) • Memahami dan peduli atas strategi livelihood orang miskin yang

Prinsip	Praktek
sektor	<p>kompleks dan beraneka ragam.</p> <ul style="list-style-type: none"> Memahami dan menyelesaikan pengaruh yang beraneka ragam dari berbagai level dan sektor yang berbeda yang mempunyai dampak terhadap livelihood orang miskin.
Kemitraan	<ul style="list-style-type: none"> Bekerja dengan pemerintah, publik, sektor swasta, dan donor
Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> Bekerja hingga terjadi keseimbangan secara ekonomi, institusi, sosial dan lingkungan. Keberlanjutan livelihood didalam menghadapi guncangan dan perubahan (bukan kelayakan sementara)
Dinamis	<ul style="list-style-type: none"> Memahami kedinamisan dari faktor-faktor yang mempengaruhi livelihoods (kondisi ini tidak pernah statis). Belajar dari perubahan dan memasukkan perubahan ke dalam intervensi pembangunan. Merespon secara fleksible perubahan di dalam kehidupan masyarakat dan membangun komitmen yang lebih panjang
Keadilan	<ul style="list-style-type: none"> Mengakui dan memahami kebutuhan dari mereka mereka yang termarginalisasi dari proses pembangunan misalnya perempuan, klas yang tidak diuntungkan, orang tua, anak muda, dsbnya Memasukkan kebutuhan orang-orang yang termarginalisasi ke dalam pembangunan. Mengakui dan memahami level yang berbeda dari kemiskinan dan menyeimbangkan dukungan kepada kelompok yang relatif paling miskin dan mereka yang rentan menjadi miskin. Mengakui, memahami dan menyelesaikan dampak jelek dari intervensi pembangunan terhadap kelompok kelompok lain.
Hak	<ul style="list-style-type: none"> Mengakui dan menyertakan secara fundamental hak-hak masyarakat di segala aspek pembangunan, penelitian, perencanaan dan intervensi, termasuk: <ul style="list-style-type: none"> Menjamin kebutuhan dasar dari kelompok yang paling tidak diuntungkan. Memperhatikan bentuk, level, kualitas, dan waktu dari partisipasi. Menjamin bahwa kerahasiaan individu diperhatikan. Menjamin kerahasiaan informasi yang diberikabn oleh orang miskin. Menyertakan kebutuhan dan praktek budaya dan agama

Sumber : Saragih, 2007

Pendekatan penghidupan berkelanjutan memberikan perhatian utama pada kekuatan masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat tersebut bergantung pada sumber daya yang ada disekitarnya dan telah hidup dalam waktu yang cukup lama secara turun temurun.

Berdasarkan pendapat dari Saragih (2007), Untuk mencapai hasil-hasil livelihoods yang positif dibutuhkan sejumlah aset. Dengan banyaknya tujuan pencapaian hasil-hasil penghidupan dan hasil yang

berbeda-beda, tidak cukup hanya dengan memiliki satu aset saja. Terutama kecenderungan warga miskin/marginal dalam mengakses capital aset sangat terbatas. Imbasnya mereka harus berinovasi untuk memperoleh dan menggabungkan berbagai aset yang mereka miliki guna bertahan hidup.

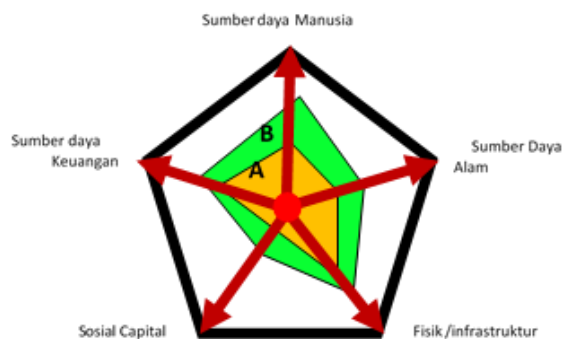
Sedangkan menurut Zamroni (2015), kekuatan masyarakat bergantung pada besar kecilnya keragaman dan keseimbangan antar aset. Contohnya ketika orang yang hidup dalam komunitas hanya memiliki uang banyak tanpa memiliki aset kekerabatan, maka hidupnya maupun keluarganya dalam komunitas akan tidak aman. Apabila dia atau keluarganya menghadapi bencana maka kecil kemungkinan keluarga lain akan membantunya.

Mengenai aset, dari satu jenis aset misalnya bisa bermakna ganda, artinya bisa sekaligus menjadi aset *tangible* dan *intangible*. Contohnya pada beberapa komunitas tertentu, seseorang yang memiliki sapi atau tanah status sosialnya akan meningkat dan sehingga perannya dalam pengambilan keputusan di masyarakat semakin meningkat. Dengan memiliki pemahaman akan aset berguna untuk penyusunan entry points yang sesuai dalam menyusun proses pemenuhan kebutuhan dari berbagai kelompok sosial, dan juga untuk menggali lebih jauh kemungkinan melakukan pertukaran antara aset-aset yang berbeda. Keseimbangan antar asset sendiri merupakan kekhasan komunitas tertentu yang mengakibatkan betapa pentingnya kepekaan untuk menggambarkan keakuratan penggambaran asset yang dimiliki. Pada umumnya kita tidak bisa, bahkan seharusnya tidak melakukan penyeragaman ukuran untuk komunitas yang berbeda untuk menunjukkan perbandingan langsung antara aset-aset tersebut. Tentu saja, hal ini tidak lantas menafikan upaya menentukan indikator-indikator aset yang khusus dan bisa diukur ketika hal itu dianggap berguna (DFID, 2000).

Tujuan dari pendekatan ini adalah berupaya maksimal untuk menghasilkan kondisi secara akurat dan sesuai kenyataan dalam melihat kekuatan yang ada di masyarakat, baik berupa aset, sumber daya maupun

modal. Selain itu, juga perlu untuk melihat bentuk transformasi masyarakat menjadi aktifitas yang menghasilkan. Sehingga diketahui kebutuhan masyarakat terhadap aset-aset yang perlu ditransformasi untuk mencapai hasil berkelanjutan.

Sumber daya atau aset yang dimiliki dalam sebuah kelompok pada suatu kawasan maupun perseorangan akan berbeda sesuai dengan tujuan dan menyebabkan hasil penghidupan yang juga berbeda. Sehingga, berdasarkan pengertian tersebut, munculnya istilah ‘miskin’ dapat dipahami sebagai capaian atau hasil dari mencari nafkah atau penghidupan yang dapat dicapai hingga saat ini, dan diukur oleh kepemilikan atau akses dari aset, sumber daya atau modal yang terbatas. Atau pada tingkatan yang lebih abstrak, kaum miskin atau yang dipersepsikan miskin dalam kenyataannya memiliki *capital asset* yang sangat terbatas. Sehingga berakibat mereka harus mencari cara untuk memperoleh dan memaksimalkan penggabungan aset-aset yang benar-benar mereka miliki dengan cara yang inovatif untuk bertahan hidup. Dalam *pentagon asset* Gambar 4., kaum miskin terwakilkan pada daerah arsiran A, dimana sumber daya manusia berada pada skala yang paling kecil, kepemilikan sumber daya alam berada pada jumlah yang sedikit serta akses pada sumber daya finansial, infrastruktur serta sosial kapital juga memiliki nilai yang kecil.

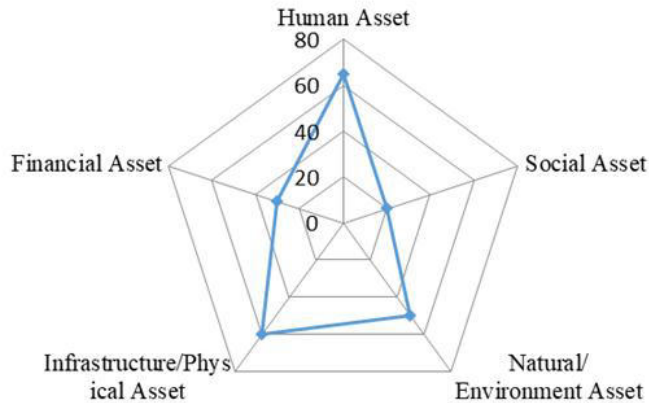


Gambar 4. Pentagon Asset: merepresentasikan kesenjangan asset yang dimiliki berdasarkan gender, maupun suku/SARA
(Sumber : Saragih dengan perubahan, 2007)

Sedangkan daerah arsiran B, sampel dari keluarga tertentu pada wilayah yang sama, dimana B memiliki aset yang lebih baik dalam lima aspek *capital asset*. Apabila suatu keluarga tertentu memiliki skala yang penuh atau sempurna dalam *capital asset*, maka dapat diambil kesimpulan bahwa keluarga tersebut dapat disebut keluarga kaya.

Bentuk segi lima atau pentagon digunakan untuk menunjukkan adanya perbedaan akses di masyarakat. Titik pusat dari pentagon dimana garis-garis bertemu menunjukkan akses nol pada aset, sedangkan batas luar menunjukkan akses maksimum pada aset. Sehingga, bentuk pentagon ini dapat diaplikasikan pada kondisi masyarakat perorangan atau kelompok sosial masyarakat. Pada umumnya pada suatu aset sumber daya alam dapat menghasilkan keuntungan berlipat. Hal ini dapat terjadi dengan adanya akses yang aman pada lahan (*natural capital*) sehingga ada jaminan *financial capital* juga terfasilitasi, karena tanah atau lahan tidak hanya digunakan untuk kegiatan produksi, namun juga dapat diberdayakan dengan sistem sewa

Pada kawasan nelayan di pesisir Kota Surabaya, realita permasalahan sosial, ekonomi, dan ekologi serta kondisi kemiskinan terjadi di wilayah pesisir Kota Surabaya. Hasil penelitian Gai (2017) menunjukkan bahwa masyarakat nelayan di Kampung Nelayan Sukolilo, Kota Surabaya belum mampu mencapai penghidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood*). Hasil penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar masyarakat nelayan belum mampu mengakses setiap modal penghidupan berkelanjutan secara optimal.



Gambar 5. Tingkat Sustainable Livelihood di Kampung Nelayan Sukolilo Pesisir Kota Surabaya
(Sumber: Gai et al, 2017)

Dari gambar pentagon aset terlihat bahwa (1) human asset berada pada tingkatan SLA sebesar 65%, (2) modal sosial berada pada tingkatan SLA sebesar 20%, (3) modal alam/lingkungan berada pada tingkatan SLA sebesar 50%, (4) modal infrastruktur berada pada tingkatan SLA sebesar 60% dan (5) modal finansial pada tingkatan SLA sebesar 30%. Dari kondisi di atas terlihat modal tertinggi ada pada modal manusia (human asset) dan modal terendah pada modal sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat sustainable livelihood kampung nelayan di wilayah pesisir Surabaya belum terlihat adanya tingkatan yang setara antara kelima aset sehingga dimensi keberlanjutan tidak bisa tercapai. Dan kondisi ini berpotensi meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap bencana (Sumber : Gai et al., 2017).

5.4 Langkah-langkah Pemberdayaan Masyarakat Melalui *Sustainable Livelihood Approach*

Berdasarkan pendapat Sajogyo (1982), terdapat hubungan timbal baik alami yang kuat antara sumber daya alam yaitu ikan, jumlah, perilaku dan kapasitas nelayan serta ekonomi dari usaha penangkapan yang dilakukan. Sehingga kemiskinan yang terjadi pada masyarakat nelayan juga perlu

dipandang sebagai komponen yang saling berhubungan. Pendekatan yang tepat dalam menanggulangi kemiskinan pada masyarakat nelayan adalah pendekatan sistem. Penggunaan sistem strategi nafkah ganda memiliki perbedaan alasan pada masing-masing rumah tangga. Pada rumah tangga kategori mampu, nafkah ganda menjadi strategi akumulasi dari modal dan bersifat ekspansi kegiatan usaha. Sedangkan pada masyarakat kategori menengah, nafkah ganda digunakan sebagai konsolidasi untuk pengembangan ekonomi rumah tangga. Pada masyarakat kategori tidak mampu, nafkah ganda merupakan strategi untuk bertahan hidup pada tingkat subsistensi dan merupakan usaha untuk keluar dari kemiskinan.

Strategi dalam mencari nafkah ini didasarkan pada pilihan berbagai sumber nafkah di lingkungan sekitarnya, semakin banyak pilihan sumber nafkah, maka akan semakin mungkin terjadinya strategi nafkah. Pada sektor perikanan strategi ini disebut dengan pola intensifikasi dan diversifikasi. Strategi ini juga dikaitkan dengan ekonomi produksi melalui usaha *cost minimization* dan *profit maximization* (Xu, 2015). Pendapat dari Crow (1989) mengungkapkan bahwa selain pilihan, strategi nafkah ini juga mewajibkan adanya sumber daya manusia dan modal, sehingga pola hubungan ini memberikan sisi berbeda dalam strategi nafkah.

Beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh rumah tangga miskin menurut Carner (1984) adalah :

1. Melakukan banyak jenis pekerjaan dengan upah rendah
2. Memanfaatkan ikatan keluarga dalam memberikan rasa aman dan perlindungan
3. Melakukan migrasi sebagai alternatif apabila tidak ada jenis pekerjaan lain yang dapat dilakukan di tempat asal

Sedangkan menurut Crow (1989), ada beberapa strategi nelayan yang digunakan untuk menghadapi kemiskinan, yaitu :

1. Peran anggota keluarga nelayan (istri dan anak)

Anggota dari rumah tangga nelayan melakukan kegiatan ekonomi sebagai salah satu strategi adaptasi dalam memenuhi kebutuhan hidup

2. Diversifikasi pekerjaan

Keluarga nelayan melakukan beberapa pekerjaan yang berbeda jenis untuk mengatasi pendapatan yang tidak pasti

3. Jaringan sosial

Jaringan sosial digunakan untuk memperoleh akses sumber daya di lingkungan sekitarnya. Jaringan sosial ini akan menjamin keamanan bagi rumah tangga kategori miskin yang menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai makhluk sosial, jaringan sosial merupakan bentuk alami dari keberadaan masyarakat. Tindakan ini menjadi bukti adanya usaha masyarakat yang masuk dalam kategori miskin untuk berusaha keluar dari kemiskinan. Pada umumnya, rumah tangga nelayan bergantung sepenuhnya pada hasil dari tangkapan melaut setiap harinya, dan jaringan sosial merupakan fungsi yang strategis dalam membantu menjaga keberlanjutan kehidupan masyarakat tersebut.

4. Migrasi

Migrasi dilakukan apabila nelayan berada dalam musim paceklik, sehingga nelayan bergabung dengan penangkapan ikan yang ada di daerah lain. Migrasi dimaksudkan untuk mendapatkan pendapatan tinggi sehingga kehidupan keluarga terjamin.

Konsep dan langkah untuk pemberdayaan nelayan pesisir melalui *sustainable livelihood*, secara umum dapat diterapkan pada seluruh kawasan pesisir. Hal ini dikarenakan adanya kesamaan permasalahan dan preferensi kemiskinan yang ada di kawasan pesisir cenderung sama satu sama lain. Berdasarkan kajian permasalahan kemiskinan, permasalahan permukiman, sumber daya manusia dan perlunya pemberdayaan. Maka dibuat konsep dan

langkah pemberdayaan ini dibagi sesuai dengan modal dalam *sustainable livelihood approach*.

Konsep dapat diterapkan sebagai panduan umum, sebagai modal penerapan dalam tingkat yang lebih tinggi. Konsep pengembangan masing-masing modal diharapkan dapat memberikan bentuk yang lebih sesuai dalam penanganan kemiskinan di kawasan nelayan pesisir. Berdasarkan konsep tersebut diperlukan langkah yang lebih aktual, agar konsep *sustainable livelihood approach* dapat teraplikasikan dalam kehidupan masyarakat nelayan pesisir. Langkah-langkah yang diambil, disesuaikan dengan kondisi nelayan pesisir di Kota Surabaya.

a. Modal sosial

Modal sosial menjadi konsep yang diterima secara umum dari berbagai bidang ilmu. Konsep modal sosial berkembang dan menjadi perhatian dari banyak pihak yang berkepentingan. Modal sosial memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi selain kapital sosial, dimana kapital sosial menjadi perdebatan secara sosiologi, antropologi, politik serta ekonomi. Modal sosial memiliki ciri khas, yaitu relasional, hal ini dikarenakan modal sosial berada pada struktur hubungan antar individu. Modal sosial didapatkan dengan menjalin hubungan dengan orang lain, dimana hubungan tersebut saling mendapatkan manfaat (Porter dalam Narayan, 1999).

Modal sosial merupakan struktur sosial yang melibatkan banyak individu, sehingga modal sosial tidak dapat dimiliki secara pribadi. Tiap-tiap individu dalam modal sosial akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari modal sosial tersebut (Coleman dalam Narayan, 1999). Modal sosial ini akan memberikan manfaat apabila ada distribusi yang dilakukan antar individu, sehingga modal sosial memiliki sifat sebagai "*barang milik umum*".

Konsep yang dapat diterapkan dalam modal sosial untuk nelayan pesisir antara lain :

1. Meningkatkan kepercayaan antar nelayan sehingga membentuk ikatan kekeluargaan
2. Memberikan kemudahan bagi anggota organisasi atau komunitas nelayan. Lembaga atau organisasi ini bertujuan untuk :
 - Media power sharing
 - Pengembangan solidaritas
 - Mobilisasi sumber daya komunitas
 - Membentuk pencapaian bersama
 - Membentuk perilaku kebersamaan dan berorganisasi
 - Membuka kesempatan untuk memperluas pemasaran

Melalui konsep yang ada, maka apabila diaplikasikan dalam studi penelitian terkait nelayan pesisir di Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Penyuluhan mengenai masyarakat madani dan berdaya pada forum rutin yang diadakan, misalnya pengajian, PKK atau rapat RT/RW

Pengertian masyarakat madani menurut Muhammad AS Hikam (1999) adalah semua wilayah kehidupan sosial yang terorganisir dan memiliki ciri-ciri; kesukarelaan, keswasembadaan, keswadayaan, dan kemandirian yang tinggi di hadapan Negara. Serta terikat oleh norma dan nilai hukum yang diikuti semua warganya. Masyarakat nelayan pesisir memerlukan pengembangan diri sebagai dasar pengembangan sumber daya manusia agar kawasan pesisir lebih berdaya.

2. Identifikasi dan optimalisasi kapasitas dari kelompok-kelompok nelayan yang potensial untuk dikembangkan

Proses ini diperlukan untuk mengetahui keragaman lembaga/organisasi nelayan, untuk kemudian menentukan lembaga/organisasi manakah yang dapat dikembangkan sebagai *pilot project*. Lembaga/organisasi ini diperkuat dan dikembangkan

untuk memberikan *influence* kepada masyarakat nelayan pesisir disekitarnya untuk meningkatkan pemberdayaan sosial.

3. Pembentukan kelompok usaha bersama dengan menggunakan bentuk Organisasi Pembelajaran Sinergik (OPS)

OPS merupakan upaya penguatan yang menggunakan pola pikir dan cara pandang masyarakat sebagai basis pelaku. Tujuan dan sasaran dengan metode OPS adalah terciptanya kelompok akar rumput yang anggotanya, baik individu maupun kelompok selalu bersemangat untuk meningkatkan kapasitasnya terus menerus. Sehingga melalui metode ini diharapkan menyentuh kesadaran dan kepekaan serta sikap dan keyakinan dalam diri manusia dan kelompok sebagai basis penilaian keberhasilannya (Indrajit, 2014).

b. Modal alam

Modal Alam adalah istilah kolektif untuk aset alam bumi dan jasa ekosistem yang dihasilkan dari mereka, yang memungkinkan manusia hidup (Deklarasi Modal Alam, 2012). Sehingga, modal alam dikaitkan dengan kawasan pesisir adalah sumber daya pesisir, laut dan isinya. Penerapan konsep modal alam ini akan bermanfaat apabila digunakan dengan benar, tidak merusak unsur alam dan berkelanjutan untuk penggunaan sumber daya alam di masa mendatang. Penerapan konsep yang diterapkan dalam modal alam untuk nelayan pesisir secara umum antara lain :

1. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat nelayan akan perubahan kondisi cuaca yang harus diperhatikan, termasuk bentuk perubahan iklim yang terjadi di kawasan pesisir
2. Membagi pengetahuan tentang tips penangkapan ikan atau teknologi terbaru dalam menangkap ikan yang disesuaikan dengan kondisi alam saat ini

Beberapa langkah yang dapat dilakukan sesuai dengan konsep modal alam pada nelayan pesisir di Kota Surabaya antara lain :

1. Memanfaatkan forum kegiatan rutin masyarakat nelayan untuk memperluas informasi mengenai kesehatan lingkungan serta kualitas air yang layak minum
2. Memanfaatkan kelompok nelayan atau OPS untuk meningkatkan pengetahuan tentang pola tangkap ikan terbaru sesuai dengan perubahan iklim saat ini
3. Penguasaan alat-alat dan cara penangkapan yang lebih efektif
4. Penguasaan teknologi dan metode dalam pengolahan hasil laut maupun kerajinan laut lainnya
5. Permindahan atau perluasan lokasi usaha daerah penangkapan di laut
6. Pemindahan lokasi usaha dari perikanan laut menjadi perikanan darat
7. Perluasan jenis mata pencaharian yang dilakukan, sebagai pendapatan alternatif saat musim paceklik
8. Perbaikan ekosistem pesisir melalui kerjasama kelompok nelayan atau OPS dengan masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir

c. Modal fisik

Modal fisik (*physical capital*) mengacu pada alat buatan manusia untuk membantu produksi. Contohnya adalah alat tangkap, mesin kapal dan peralatan atau mesin pengolah hasil laut. Ini adalah salah satu penentu kapasitas produksi nelayan, selain faktor sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi. Dengan demikian, pasokannya menentukan potensi output yang dihasilkan. Konsep yang diterapkan dalam modal fisik secara umum antara lain :

1. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya bahan lokal untuk mengoptimalkan jenis penjualan di kios-kios masyarakat
2. Melakukan pemeliharaan berkala pada infrastruktur dan fasilitas yang sudah dibangun

3. Memperbaiki prasarana dan sarana kawasan permukiman nelayan pesisir yang belum sesuai standar ideal

Beberapa langkah yang dapat dilakukan sesuai dengan konsep yang akan diterapkan pada modal fisik di nelayan pesisir Kota Surabaya adalah :

1. Perbaikan infrastruktur yang mengalami kerusakan atau penurunan kualitas

Infrastruktur yang dimaksud adalah prasarana disekitar kawasan permukiman nelayan yang berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari nelayan, dan juga infrastruktur yang digunakan nelayan untuk mendapatkan hasil laut.

2. Pemeliharaan infrastruktur secara berkala sebagai bentuk antisipatif terhadap kerusakan yang mungkin terjadi

3. Pembangunan area perdagangan yang diperuntukkan untuk jual beli hasil laut nelayan maupun produk olahan

Area perdagangan dapat berupa tempat pelelangan ikan (TPI) atau pasar lokal yang memang diarahkan untuk area khusus penjualan ikan dan hasil olahan nelayan sekitarnya.

4. Pembentukan akses politik antara komunitas nelayan dengan pemerintah daerah, sehingga kebijakan untuk nelayan lebih tepat

Akses politik ini diperuntukkan agar kebijakan yang dibuat lebih tepat sasaran sesuai dengan kondisi nelayan pesisir. Akses politik ini dapat dibentuk dengan bupati/walikota, dinas terkait maupun lembaga-lembaga yang menaungi masalah humanis atau perikanan.

d. Modal manusia

Modal manusia adalah komponen yang sangat penting di dalam organisasi. Manusia dengan segala kemampuannya bila dikerahkan keseluruhannya akan menghasilkan kinerja yang luar biasa. Ada enam komponen dari modal manusia, yakni modal intelektual, modal emosional, modal sosial, modal ketabahan, modal moral dan modal kesehatan (Ancok,2002). Keenam komponen modal manusia ini akan muncul dalam

sebuah kinerja yang optimum apabila disertai oleh modal kepemimpinan dan modal struktur organisasi yang memberikan wahana kerja yang mendukung.

Perempuan dapat menjadi salah satu alternatif dalam pengembangan strategi nafkah yang berkelanjutan. Hal ini dapat terwujud dengan memanfaatkan ikatan sosial antar penduduk perempuan sehingga memiliki akses pada modal finansial. Dukungan dari pihak laki-laki (suami atau orang tua) menentukan keterbatasan perempuan untuk berkecimpung dalam kegiatan yang reproduktif. Sehingga tanpa adanya dukungan dari pihak laki-laki, peran perempuan dalam mencari nafkah masih terbatas. Torkelsson (2007) memberikan pernyataan bahwa ikatan sosial dan kerjasama penduduk perempuan bergantung pada dukungan dari penduduk laki-laki. Dukungan yang dapat dilakukan dari pihak laki-laki seperti pemberian informasi atau pemberian fasilitas untuk melakukan kegiatan produktif seperti arisan, pelatihan, simpan pinjam atau kegiatan lainnya.

Konsep yang diterapkan dalam modal manusia untuk nelayan pesisir, secara umum antara lain :

1. Memberikan insentif yang sesuai bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam program atau kegiatan rutin komunitas atau organisasi
2. Meningkatkan ketrampilan dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan hasil laut
3. Memberikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan pengembangan atau ciri khas masing-masing kawasan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan pembinaan pendidikan baik formal maupun informal
5. Memberdayakan kaum wanita pesisir atau istri nelayan untuk mengolah kerajinan atau mengembangkan pemasaran dari hasil produksi laut

Langkah nyata yang dapat dilakukan di nelayan pesisir Kota Surabaya sesuai dengan konsep pada modal manusia adalah :

1. Pembentukan kelas belajar non-formal antar nelayan untuk menimba dan menularkan pengalaman mengenai strategi dan teknik produksi
2. Pembentukan kelas belajar non-formal untuk wanita pesisir dan istri nelayan untuk mengolah hasil laut dan tata cara pengembangan pemasaran
3. Pemberian penyuluhan mengenai pentingnya pendidikan untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan
4. Pemberian insentif berupa informasi dan pengetahuan pada masyarakat nelayan yang terlibat aktif dalam kelembagaan nelayan ataupun OPS

e. Modal finansial

Modal finansial adalah sumber daya ekonomi apa pun yang diukur dalam bentuk uang yang digunakan oleh para nelayan untuk membeli apa yang mereka butuhkan untuk melaut, membuat produk olahan hasil laut atau untuk menyalurkan produk nelayan ke sektor ekonomi di mana operasi dilakukan, seperti pasar, pertokoan, TPI dan lain-lain.

Adanya keterbatasan dalam mengakses modal finansial perlu ditingkatkan dengan membentuk lembaga keuangan mikro. Lembaga ini akan berjalan dengan lancar apabila ada kepercayaan yang tinggi di masyarakat. Lembaga keuangan mikro dibentuk dengan memanfaatkan lembaga kesejahteraan tradisional yang sudah berkembang di lingkungan masyarakat.

Konsep yang dapat diterapkan secara umum dalam modal finansial untuk nelayan pesisir antara lain :

1. Memperkuat lembaga atau organisasi lokal yang mengatur simpan pinjam pada masyarakat
2. Menjalin kerjasama dari berbagai pihak terkait sektor perikanan untuk mengembangkan permukiman nelayan dalam bentuk investasi modal, promosi maupun teknologi

Langkah-langkah yang dapat dilakukan pada kawasan pesisir nelayan Kota Surabaya sesuai dengan konsep modal finansial yang ada adalah :

1. Pelaksanaan program Organisasi Pembelajaran Sinergik (OPS) untuk meningkatkan kemauan masyarakat dalam perbaikan taraf hidup dan lingkungan
2. Pemberian kemudahan dalam program pinjaman bergulir
3. Peningkatan jaringan komunikasi dan akses menuju investor untuk meningkatkan modal
4. Peningkatan pemasaran olahan hasil laut sebagai sumber finansial alternatif



DAFTAR PUSTAKA

- Abeje, Misganaw T.. 2019. Communities Livelihood Vulnerability to Climate Variability in Ethiopia. MDPI Journal
- Adi, Isbandi Rukminto. 2008. Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. PT Grafindo Persada:Jakarta
- Ancok, Djamaludin. 2002. Outbond Management Training. UII Press. Jogjakarta
- Asriadi, Wilis Sutiono. 2018. Kriteria Dasar Infrastruktur Permukiman Pada Daerah Nelayan (Contoh Kasus Daerah Nelayan Kota Sorong). Universitas Muhammadiyah Sorong. Sorong
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (BAPPEKO) Surabaya. 2011. Rencana Strategis Wilayah Pesisir Kota Surabaya.
- Baun, Paula Issabel. 2008. Kajian Pengembangan Pemanfaatan Ruang Terbangun di Kawasan Pesisir Kota Kupang. Universitas Diponegoro-Semarang.
- Budihardjo, Eko. 2006. Percikan Masalah Arsitektur Perumahan Perkotaan. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Carner, G. 1984. *Survival, interdependence and competition among the Philippine rural poor in peoplecentered development*. Connecticut: Kumarian Press.
- Chambers. 1995. *Poverty and livelihoods: whose reality counts? Environment and Urbanization*.
- Christy, F.T..1982. Hak Guna Wilayah dalam Perikanan Laut. Makalah Teknis Perikanan FAO Nomor 277.
- Courtney, C.A. .1999. *Coastal Resource Management Project*. Jurnal Pesisir dan Lautan, 2 (1), 46-64
- Cramb, R., Colfer, C., Dressler, W., Laungaramsri, P., Le, Q., Mulyoutami, E., Peluso, N., & Wadley, R..2009. *Swidden Transformations and Rural Livelihoods in Southeast Asia*. *Human Ecology*, 37 (3), 323-346.
- Crawford, B.R., Kussoy, P., Pollnac, R.B. & Sondita, F.A..1999. *A Comparison of Level of Development Among Coastal and Non-Coastal Communities in North Sulawesi and South Sumatra*. Pesisir dan Lautan, 2(1), 1-12.

- Crow, G..1989. *The Use of The Concept of Strategy in Recent Sosiological Literature. Sociology*, 23(1), 1-24.
- Dahuri, R et al. 2001. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. PT.Pradnya Paramita. Jakarta
- DFID.1999. DFID (1999). *Sustainable livelihoods Guidance Sheets. Department for International Development*.
<http://www.livelihoods.org/>
- DFID.2000. *Sustainable Livelihood Guidance Sheets*, Department for International Development,
www.livelihoods.org/info/info_guidancesheets.html
- DFID. 2001. *Sustainable Livelihoods Guidance Sheets*. Eldis Document Store.
- Dharmawan, Vippy, Zuraida. 2016. Identifikasi Masalah Permukiman pada Kampung Nelayan di Surabaya. Simposium Nasional Teknologi Terapan (SNTT) 4. Surabaya
- Eddins, Emily and Stuart Cottrell. 2013. *The International Journal of Sustainability Policy and Practice*. Common Ground Publishing. USA
- Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Harper, D., & Gillespie, G. (1997). *Give and Take Among The Rural Poor. The International Journal of Sociology and Social Policy*, 17, 102-129.
- Ekowati, S., O. Rusmana dan M. Mafudi, Akuntansi, Organisasi dan Masyarakat : Pengaruh Modal Fisik, Modal Finansial dan Modal Intelektual Terhadap Kinerja Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia, 2012.
- Ellis, F. (2000). *Rural Livelihoods and Diversity in Developing Countries*. Oxford: Oxford University Press.
- Fattah, Nanang, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004.
- Fauzi, A. 2004. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Febrianto, H. Rahardjo. 2005. *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Gai, Ardiyanto M., I. Soewarni and M. M. Sir., *The Concept of Community Poverty Reduction in Coastal Area of Surabaya Based on Sustainable Livelihood Approach*, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2017.
- Hadi, P Sudharto. 2005. *Aspek sosial amdal*. Gajah Mada University Press :Yogyakarta.

- Hardono, G.S., & Handewi, P.S. (2006). Diversifikasi Pendapatan Rumah Tangga di Indonesia; Analisis Data
- Harlianingtyas, Irma, dkk. (2013). Pemodelan Partisipasi Wanita dalam Kegiatan Ekonomi Rumah Tangga Nelayan di Pesisir Timur Surabaya. *Jurnal : Sains Dan Seni Pomits*, 2 (01), hlm. D1-D6
- Hilakore, M.A., J.A. Marius, D. Sidu, I. Sangadji, Bahrin, I.T. Matitaputty. 2004. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Muara Angke di Kelurahan Pluit Penjaringan Jakarta Utara, April 2004, IPB.
- Kalimang, E.S. Sufia. 2015. Paper Psikologi Komunitas : Problematika Masyarakat Nelayan di Kenjeran Surabaya. Universitas Airlangga
- Kamaruddin, Roslina. 2014. *The Sustainable Livelihoods Index: A Tool To Assess The Ability And Preparedness Of The Rural Poor In Receiving Entrepreneurial Project*. Journal of Social Economics Research
- Kartasasmitha, Ginandjar. 1996. Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. PT Pusaka Cisendo: Jakarta
- Kay R, J Alder. 1999. *Coastal Planning and Management*. London: E & FN Spon
- Khatiwada, Shanta P. Et al. 2017. *Household Livelihood Strategies and Implication for Poverty Reduction in Rural Areas of Central Nepal*. MDPI Journal
- Kodoatie, Robert J.. 2005. Pengantar Manajemen Infrastruktur, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Kotalaha, Yosafat, Gatot Sasongko. 2018. Kearifan Lokal “Makriwo” dalam Perspektif Sustainable Livelihood (Studi Kasus Petani Kelapa Desa Apulea Kabupaten Halmahera Utara, Indonesia). *Sodality : Jurnal Sosiologi Pedesaan* Volume 6 No.3 Desember 2018 hal 252-262
- Kusnadi. 2002. Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan. Pelangi Aksara. Yogyakarta
- Kusnadi. 2003. Akar Kemiskinan Nelayan. LKIS. Yogyakarta
- Kusnadi. 2007. Jaminan Sosial Nelayan. Pelangi Aksara. Yogyakarta
- Ma, Jinhai et al. 2018. *Study on Livelihood Assets-Based Spatial Differentiation of the Income of Natural Tourism Communities*. MDPI Journal
- Mirjam Macchi, Amanda Manandhar Gurung, Brigitte Hoermann, Dhrupad Choudhury. 2011. *Climate Variability And Change In The Himalayas Community Perceptions And Responses*. Nepal : International Centre for Integrated Mountain Development]. Hal. 1.

- Mubyarto, dkk.1984. Nelayan dan Kemiskinan; Studi Antropologi di Dua Desa Pantai. Rajawali. Jakarta
- Mubyarto. 1985. Pancasila Economic System. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta
- Muhammad AS Hikam. 1999. Demokrasi dan *Civil Society*. Pustaka. Jakarta
- Muhsoni, F.F..2006. Kajian Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Ikan di Perairan Selat Madura dengan Menggunakan Metode Holistik Serta Analisis Ekonominya. *Embryo*, 2(3), 35-47.
- Muslim, Azis. 2012. Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat. Samudra Biru: Yogyakarta
- Muttaqiena, dkk. 2009. Makalah Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Berkelanjutan Pasca Tsunami Desember 2004. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Semarang
- Narayan, D..1999. Bonds and Bridges; Social Capital and Poverty. World Bank. Washington DC
- Nasution A, Badaruddin. 2005. Isu-isu Kelautan dari Kemiskinan Hingga Bajak laut. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Nugroho, Heru. 1995. “Kemiskinan, Ketimpangan dan Pemberdayaan, dalam Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia”. Yogyakarta: Aditya Media.
- Purnomo, Heri A., S. H. Suryawati, I. M. Radjawane dan K. O. Sembiring. 2015. Perubahan Ikim di Wilayah Pesisir : Konsepsi dan Aplikasi Strategi Adaptasi. Penerbit ITB. Bandung
- Rachmawati, Farida. 2017. Permukiman Nelayan di Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Melalui Pendekatan Sustainable Coastal Development. Tesis. Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya.
- Rahmawaty. 2006. Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Kelautan Secara Terpadu dan Berkelanjutan. Universitas Sumatera Utara. Medan
- Ramdani, Bani Dipra dan Ragil Haryanto, 2013, Preferensi Masyarakat Terhadap Penataan Kawasan Permukiman Nelayan Kumuh di Desa Kurau Kecamatan Koba, Kabupaten BangkaTengah, Universitas Diponegoro. Semarang
- Sajogyo dan Pudjiwati Sajogyo. 1982. Sosiologi Pedesaan : Kumpulan Bacaan. Jilid 2. Gadjah Mada University Press. Jakarta.
- Saragih, Sebastian, Jonathan Lassa dan Afan Ramli. 2007. Kerangka Penghidupan Berkelanjutan (*Sustainable Livelihood Framework*).

- Sarman, Sufrin, Karto Wijaya. 2018. Pola Permukiman Pesisir Pantai : Studi Kasus Desa Talaga I dan Desa Talaga 2 Kecamatan Talaha Raya Kabupaten Buton Tengah. *Jurnal Arsitektur Zonasi* Volume 1 Nomor 1 Juni 2018.
- Satria, A..2001. *Dinamika Modernisasi Perikanan; Formasi Sosial dan Mobilitas Nelayan*. Humaniora Press. Bandung
- Satria, Arif. 2009. *Ekologi Politik Nelayan*. Printing Cemerlang . Yogyakarta
- Serrat, O..2008. *Sustainable Livelihoods Approach*. Knowledge Solution : Asian Development Bank. Mandaluyong-Philippines
- Seth Tuler, Julian Agyeman, Patricia Pinto da Silva, Karen Roth LoRusso, Rebecca Kay., 2008. *Assessing Vulnerabilities: Integrating Information about Driving Forces that Affect Risks and Resilience in Fishing Communities*. *Human Ecology Review*, Vol. 15, No. 2
- Skoufias, E., Lunde, T., & Patrinos, H. (2010). *Social Networks Among Indigenous Peoples in Mexico*. *Latin American Research Review*, 45(2).
- Su, Mingming et al. 2018. *A Community Livelihood Approach to Agricultural Heritage System Conservation and Tourism Development : Xuanhua Grape Garden Urban Agricultural Heritage Site, Hebei Province of China*. MDPI Journal
- Su, Zhen et al. 2019. *Sustainable Livelihood Capital and Strategy in Rural Tourism Households : A Seasonality Perspective*. MDPI Journal
- Suharto,Edi. 2007. *Modal Sosial dan Kebijakan Publik*
- Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memerdekakan Rakyat*. PT Rideka Aditama:Bandung
- Sumodiningrat, Gunawan. 2003. *Pengembangan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. PT. Bina Pariwara: Jakarta
- Suryawati. 2004. *Teori Ekonomi Mikro*. UPP. AMP YKPN. Jarnasy. Yogyakarta
- Susan L. C., 2003. *Social Vulnerability To Environmental Hazards*. In *Social Science Quarterly*, Volume 84, Number 2, June 2003.
- Susenas. Dalam K. Suradisastra, Y. Yusdja, M. Siregar, & K. Kariyasa (Eds.), *Diversifikasi Usahatani dan Konsumsi: Suatu Alternatif Peningkatan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani*. Bogor : Pusat Analisis Sosial
- Suyanto, B. 2003. *Kajian Model Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Desa Pantai Madura dan Kawasan Selatan Jawa Timur*. Surabaya: Lemlit Unair dengan Balitbang Propinsi Jatim.

- Torkelsson, S..2007. *Resources, Not Capital: A Case Study of the Gendered Distribution and Productivity of Social Network Ties in Rural Ethiopia*. Rural Sociology, 72 (4), 583-607.
- Umbara, Andy Rizal. 2003. Tesis Kajian Relkasi Permukiman Kumuh Nelayan ke Rumah Susun Kedaung Kelurahan Sukamaju Bandar Lampung. Universitas Diponegoro Semarang
- Undang-undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- Wahyono, Ary, Masyhuri Imron, Ibnu Nadzir. 2013. Kapasitas Adaptif Masyarakat Pesisir Menghadapi Perubahan Iklim : Kasus Pulau Gangga, Minahasa Utara. Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kawasan Pesisir Volume 3 No.2 Tahun 2013. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kelautan dan Peirikanan
- Wastuti, Ifriany Tri. 2014. Arahana Pengembangan Permukiman Nelayan Berbasis Ekowisata di Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai. UIN Alauddin Makassar
- Widodo, Slamet. 2011. Strategi Nafkah Berkelanjutan Bagi Rumah Tangga Miskin di Daerah Pesisir. Makara, Sosial Humaniora Volume 15 No.1 Juli 2011.
- Winoto, Gatot. 2006. Tesis Pola Kemiskinan Permukiman Nelayan Kelurahan Dompok Kota Tanjungpinang. Universitas Diponegoro Semarang
- Wiyana, Adi. 2004. Faktor Berpengaruh Terhadap Keberlanjutan Pengelolaan Pesisir Terpadu (P2T).
- Wu, Xiaoying et al. 2019. *Research in the Intergerational Transmission of Poverty in Rural China Based on Sustainable Livelihood Analysis Framework L A Case Study of Six Poverty-Stricken Counties*. MDPI Journal
- Xu, Dingde et al. 2015. *Household Livelihood Strategies and Dependence on Agriculture in the Mountainious Settlements in the Three Gorges Reservoir Area, China*. MDPI Journal
- Zamroni, Sunaji dkk. 2015. Desa Mengembangkan Penghidupan Berkelanjutan. Yogyakarta: IRE Yogyakarta.
- Zubaedi.2007.Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.Ar Ruzz Media:Jakarta



INDEKS

A

Adaptasi · 3, 55, 91

C

capital asset · 76

D

daya beli · 42
dependency · 41
diversifikasi · 78

E

ekosistem · 6, 7, 12, 20, 21, 30, 31, 35, 48, 55,
56, 66, 82, 83
eksploitasi · 8, 54, 63
eksplorasi · 14, 26, 35, 54

F

financial capital · 77
finansial kapital · 51

I

indikator · 34, 35, 36, 37, 38, 44, 57, 66, 72,
75
intensifikasi · 78
investasi · 30, 37, 52, 87
isolation · 41

K

Keberlanjutan ekonomi · 31, 71
Keberlanjutan kelembagaan · 71
Keberlanjutan lingkungan · 71
Keberlanjutan sosial · 31, 71

kelayakan huni · 27
kemiskinan · 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 32, 33,
40, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 52, 53, 59, 66,
69, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80
Kerangka · 4, 49, 50, 51, 55, 91
kerentanan · 2, 18, 41, 42, 57, 58, 59, 60, 61,
78
kesejahteraan · 2, 3, 8, 15, 16, 20, 21, 28, 33,
34, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 50, 54, 63, 66,
70, 87
komposisi · 46
konsep keberlanjutan · 31
Kota Surabaya · 1, 3, 4, 8, 9, 13, 14, 15, 19,
25, 33, 35, 36, 37, 38, 60, 77, 80, 81, 83,
84, 86, 87, 88
kumuh · 17, 18, 19, 20, 22, 28

M

Masyarakat nelayan · 2, 12, 14, 15, 60, 82
Masyarakat pesisir · 1, 2, 9
modal alam · 2, 35, 77, 82, 83
modal finansial · 2, 38, 78, 85, 86, 87
modal fisik · 2, 36, 43, 84
modal manusia · 2, 37, 78, 85, 86
modal sosial · 2, 33, 34, 52, 59, 67, 77, 80, 81,
85

N

natural capital · 77
nelayan besar · 53
nelayan kecil · 10, 52, 53, 54

O

opportunity cost · 11
Organisasi Pembelajaran Sinergik · 82, 87
overfishing · 13

P

partisipasi masyarakat · 3
partisipatif · 2, 71, 72, 73
patron-klien · 61, 67, 68

pembangunan kawasan pesisir · 3
pemberdayaan masyarakat · 2, 3, 30, 49, 65,
68
pemerintah · 3, 14, 21, 28, 32, 37, 38, 45, 46,
53, 55, 58, 66, 70, 73, 84
Pemetaan · 45
pentagon · 76, 77
Permukiman nelayan · 17, 18, 19, 24, 26
perubahan iklim · 55, 56
perubahan iklim · 2, 3, 34, 35, 36, 37, 38, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 83
powerless · 40
Pro-sosial · 44

R

revolusi biru · 20, 47, 54
rumah tangga nelayan · 13, 23, 79

S

state of emergency · 41
stratifikasi · 11
Sukolilo · 1, 4, 9, 77
Sustainable Livelihood Approach · 2, 49

T

terpadu · 3, 7, 8, 32, 55
Tingkat partisipasi · 43
tipologi · 11
tradisional · 2, 9, 12, 14, 19, 22, 36, 48, 53,
61, 67, 87
transformasi · 64, 75